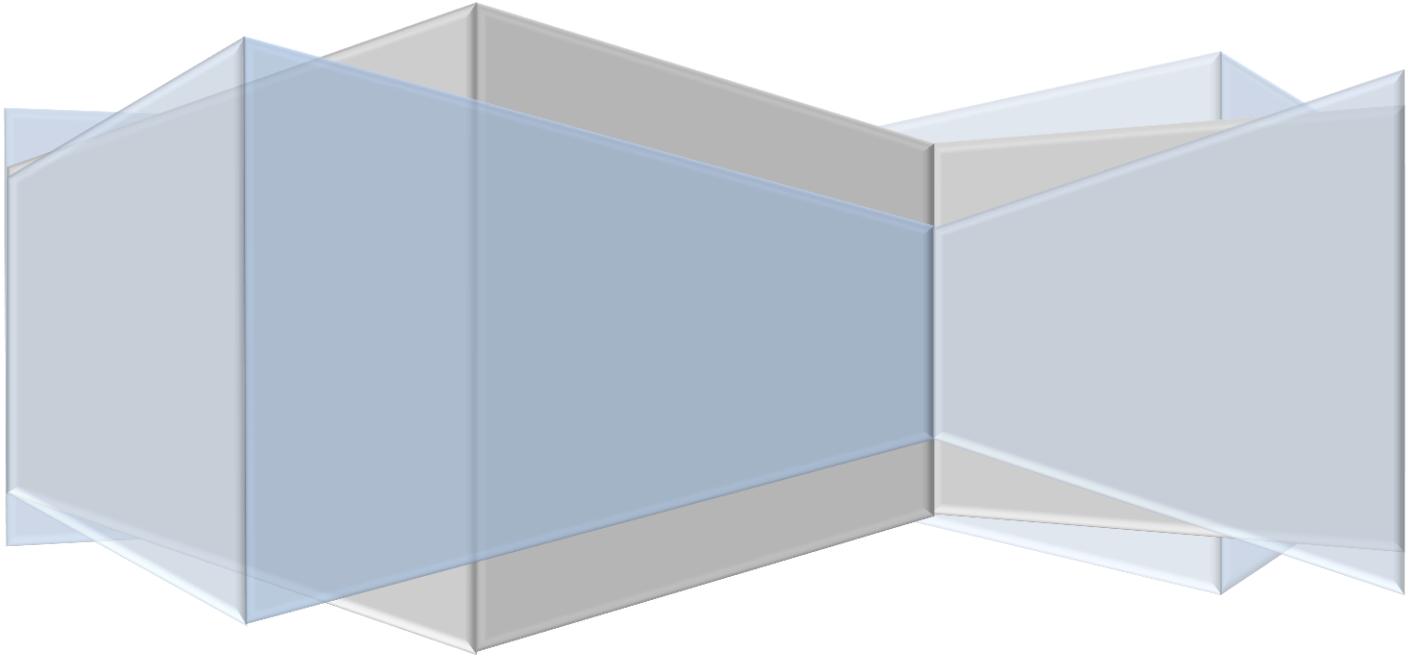




Pemerintah Kabupaten Pemalang

*(draft)*



**RENSTRA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**TAHUN 2021-2026**

**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang**

**Tahun 2021**

## KATA PENGANTAR

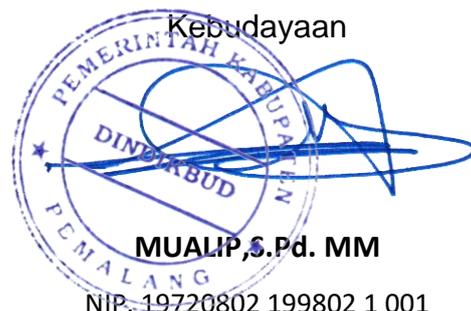
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayahNya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang merupakan dokumen perencanaan strategis menguraikan tentang pendahuluan, gambaran kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2016 – 2020, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan strategi, program prioritas pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pemalang. Renstra ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja Disporapar) dan acuan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkala.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai langkah kebijakan mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 dan tugas dan fungsi perangkat daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good goevernance*).

Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap perangkat daerah yang telah menyediakan data dan informasi dalam penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan ini. Pelaksanaan Renstra PD memerlukan dukungan segenap pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Pemalang.

Pemalang, Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan



**MUALIP, S.Pd. MM**  
NIP. 19720802 199802 1 001

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-7
1.4. Sistematika Rencana Strategi .....	I-8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	II-1
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan .....	II-9
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.....	II- 14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Pemalang .....	II-26
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD .....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 .....	III-2
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan (1) Renstra Kebudayaan dan Provinsi Jawa Tengah .....	III-8
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	III-12
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-14

<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	IV-
1	
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ...	IV-1
<b>BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>V-1</b>
5.1. Strategi .....	V-1
5.2. Kebijakan .....	V-1
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA     PENDANAAN .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>
8.1 Pedoman Transisi .....	VIII-1
8.2 Kaidah Pelaksanaan .....	VIII-1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Kab. Pemalang .....	II-11
Tabel 2.2	Kondisi Ruang Kelas di Kab. Pemalang Tahun 2020 .....	II-11
Tabel 2.3	Benda Cagar Budaya di Kab. Pemalang Tahun 2020 .....	II-13
Tabel 2.4	Kesenian Tradisional di Kabupaten Pemalang .....	II-13
Tabel 2.5	Perkembangan Kesenian Modern di Kabupaten Pemalang .....	II-14
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD .....	II-16
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas .....	II-18
Tabel 3.1.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	III-7
Tabel 3.2.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	III-9
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	III-11
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	III-13
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang 2021-2026 .....	IV-3
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 .....	V-2
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 ..	VII-2

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang bersifat strategis dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berakhlak mulia serta menjunjung tinggi peradaban dan budaya. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pendidikan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan menyelenggarakan pendidikan dasar yaitu : (1) pendidikan anak usia dini (PAUD); (2) pendidikan dasar dan (3) pendidikan kesetaraan. Sebagai urusan kewenangan dasar pendidikan, maka wajib melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) berdasarkan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang menargetkan semua indicator tercapai 100% (seratus persen). SPM Pendidikan harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya adalah : (1) pemenuhan SPM pada Layanan Pendidikan PAUD; (2) Pendidikan Dasar dan (3) Pendidikan Kesetaraan. Sedangkan urusan kebudayaan meliputi kewenangan tentang sub urusan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah dan cagar budaya daerah yang sangat penting dalam melestarikan jatidiri masyarakat.

Tantangan dalam pembangunan Pendidikan di Kabupaten Pemalang antara lain : Belum optimalnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang (tahun 2020) sebesar 66,32 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,87. Hal yang terkait erat dengan bidang Pendidikan dan kebudayaan adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) (2020) sebesar 6,42 tahun (setara dengan lulus sekolah dasar/sederajat) dan harapan lama sekolah (HLS) di kabupaten pemalang sebesar 11,95 tahun masih lebih rendah (dibandingkan Jawa Tengah sebesar 12,70 tahun). Masalah lain adalah belum semua anak usia sekolah mendapatkan pelayanan Pendidikan formal dan Pendidikan non

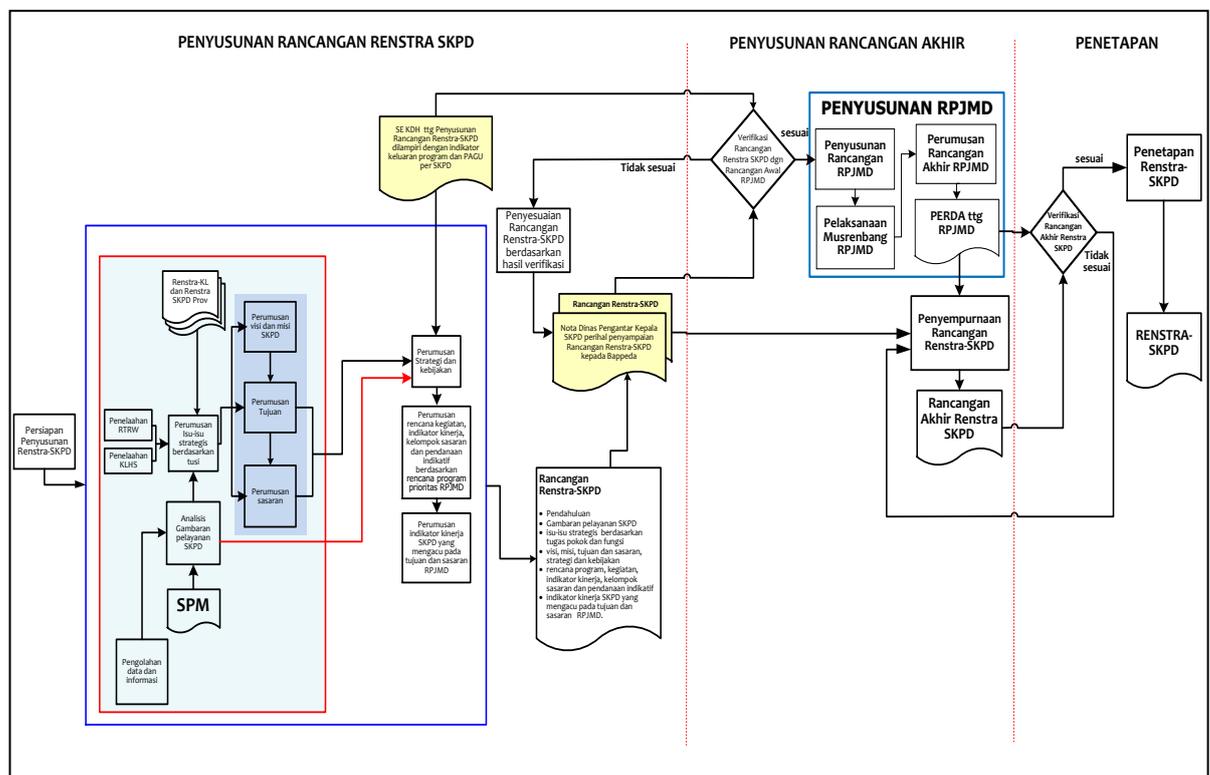
formal (Pendidikan kesetaraan dan kewajiban memenuhi capaian standar Pendidikan minimal (SPM) Pendidikan belum optimal, capaian tahun 2020, Angka Partisipasi Sekolah (APS) belum dapat tercapai, terutama capaian PAUD (sebesar 46%), Angka Partisipasi Sekolah SD mencapai 100% dan Angka Partisipasi Sekolah SMP mencapai 74,81% belum mencapai target. Sedangkan masalah pembangunan pendidikan antara lain belum optimalnya pelayanan Pendidikan penduduk usia sekolah (6 – 15 tahun) secara merata, pelaksanaan operasional sekolah dari dana BOS dan Alokasi DAK Fisik untuk pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan belum tercukupi, tenaga pendidik PAUD belum sesuai standar, tenaga kependidikan di tingkat Pendidikan dasar belum memadai. Masalah pandemic Covid 19 sejak bulan Maret 2020 menimbulkan beragam permasalahan, baik masalah kesehatan, sosial ekonomi dan ketenagakerjaan yang mengakibatkan meningkatnya penduduk miskin, turunnya daya beli masyarakat mengakibatkan anak usia sekolah tidak dapat bersekolah atau mengalami putus sekolah serta keterbatasan akses Pendidikan secara daring dalam penyelenggaraan pembelajaran di seluruh Indonesia dan termasuk Kabupaten Pematang Jaya. Peningkatan manajemen Pendidikan, pengelolaan keuangan, dana BOS dan dana APBD agar lebih efektif dan efisien, serta pelaporan yang tepat waktu. Kelengkapan data Pendidikan yang valid dan terverifikasi akan memudahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang Jaya melaksanakan kebijakan dan strategi, program dan kegiatan tepat sasaran. Diharapkan pemenuhan SPM Pendidikan dapat tercapai 100% pada akhir perencanaan. Pembangunan Pendidikan dengan mewujudkan seluruh anak wajib Pendidikan menempuh Pendidikan sesuai dengan Program Wajib Belajar secara Nasional (Wajar 12 Tahun). Kebijakan ini memerlukan komitmen dan dukungan segenap perangkat daerah, pemangku kepentingan pembangunan pendidikan melalui kerjasama multi sektoral secara berkelanjutan sehingga harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pematang Jaya semakin baik di tahun-tahun mendatang.

Pembangunan Pendidikan harus mendapatkan prioritas penting dalam rangka meningkatkan tata kelola pembangunan pendidikan secara baik, menjangkau seluruh anak usia sekolah dan tercapainya target SPM

pendidikan secara umum di Kabupaten Pemalang memerlukan peran serta pemangku kepentingan pembangunan pendidikan. Indikator SPM Pendidikan meliputi 4 (empat) indikator pendukung, angka partisipasi sekolah, memerlukan komitmen sekolah dalam pemanfaatan dana BOS yang diterima, melakukan efisiensi dan efektifitas atas alokasi belanja serta APBD dalam pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan di Kabupaten Pemalang.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus sinergis dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang, arahan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan dari Pusat yaitu berdasarkan telaah Renstra Kementerian/Lembaga serta dokumen perencanaan pembangunan yang terkait. Maka pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pemalang tahun 2021 – 2026 memerlukan dukungan dari segenap perangkat daerah dan pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Hubungan antara Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dikemukakan ringkas sebagai berikut :



### **Gambar 1.1 Keterkaitan Hubungan Renstra PD dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.**

Proses penyusunan Renstra PD adalah berdasarkan Pasal 89 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahap-tahap pelaksanaan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dengan penetapan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman pembangunan bidang Pendidikan dan kebudayaan bersifat tidak terpisahkan dari bidang-bidang pembangunan daerah yang lain, terintegrasi dan berkelanjutan, hal ini mengingat bahwa pembangunan Pendidikan merupakan investasi bagi peningkatan sumberdaya manusia dan pengembangan kebudayaan memperluas jatidiri masyarakat Kabupaten Pemalang.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang 2021-2026 berpedoman pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
17. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
  21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
  22. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
  23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor xxx);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024;
  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
  32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 3);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
  39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
  40. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 adalah mewujudkan pedoman dan arah kebijakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan serta menyediakan indikator capaian kinerja yang akan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati Pemalang.

## 2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang tahun 2021 - 2026, sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah, pedoman koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan pengawasan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- b. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode perencanaan tahun 2021 – 2026.
- c. Menyusun program strategis sebagai dasar perencanaan program jangka menengah daerah dan rencana kerja tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran;
- d. Menyediakan indikator untuk evaluasi kinerja bagi seluruh perangkat daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### 1.4 Sistematika Rencana Strategis

Sistematika Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang penyusunan renstra, maksud dan tujuan, landasan dan hukum dan sistematika Renstra PD.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Menjelaskan tentang permasalahan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pematang, telaah visi, misi dan program kepala daerah, telaah renstra kementerian dan

kelembagaan terbaik, telaah rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu strategis bidang pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Menjabarkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dicapai selama tahun 2022 - 2026.

**BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Menjabarkan strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama tahun 2022 - 2026.

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Menjabarkan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan, tahun 2021 – 2026.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menjabarkan tentang Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pematang Tahu 2021 – 2026.

**BAB VIII PENUTUP**

Menjabarkan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN**

### **DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kewenangan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup pendidikan dan kebudayaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang beserta tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

##### **2.1.1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - c) Pembina dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - d) Penyusunan dan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelapor di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - f) Pembina terhadap UPTD dalam lingkup pendidikan dan kebudayaan;
  - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### 2.1.2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan sebagai berikut :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan program dan melaksanakan perencanaan, ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, pelengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan perencanaan dan pengkoordinasian program dan kegiatan satuan kerja;
  - b. Pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan sekretaris dibantu oleh :
- a. Kepala Sub Bagian Bina Program
  - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Kepala Sub Bagian Keuangan

### 2.1.3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi;
  - a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
  - b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis proses belajar mengajar dan pengelola manajemen sekolah dasar dan menengah pertama;
  - c. Pelaksanaan akreditasi, pendirian dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
  - d. Pelaksanaan fasilitas dan pengawasan kurikulum serta penggunaan buku belajar bagi tingkat pendidikan dasar;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dibantu oleh :
  - a. Kepala Seksi Sekolah Dasar
  - b. Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama

c. Kepala Seksi Kurikulum

2.1.4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat melaksanakan tugas :

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pendidikan masyarakat dan pendidikan anak usiadini.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang Pembinaan pendidikan kemasyarakatan dan anak usia dini mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pendidikan masyarakat dan pendidikan anak usia dini;
  - b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis proses belajar mengajar, manajemen sekolah dan pengembangan profesi tenaga pendidik pendidikan kemasyarakatan dan Pendidikan anak usia dini;
  - c. Melaksanakan akreditasi, pelayanan perajinan, pendirian dan penutupan pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan anak usia dini;
  - d. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan anak usia dini;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang pembinaan pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan anak usia dini dibantu oleh :
  - a. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
  - b. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat.

#### 2.1.5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

Kepala Bidang sarana dan prasarana melaksanakan tugas pokok dan fungsi :

- (1) Kepala bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana pendidikan dari PAUD, SD dan SMP;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
  - a. Merencanakan Program dan Kegiatan Bidang sarana dan prasarana;
  - b. Penyusunan rancangan kebijakan program dan kegiatan sarana dan prasarana dibidang pendidikan;
  - c. Menyiapkan petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
  - d. Menyelenggarakan program dan kegiatan seksi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan dan sekolah dasar sesuai dengan pelaksanaan anggaran (DPA);
  - e. Menyusun rancangan inovasi urusan pendidikan bidang sarana dan prasarana berdasarkan identifikasi permasalahan;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepala Bidang Sarana dan prasarana dibantu oleh :

- a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pendidikan anak usia dini
- b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar
- c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama

#### 2.1.6. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- (1) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas

pokok melaksanakan pembinaan dan pengendalian tenaga pendidik;

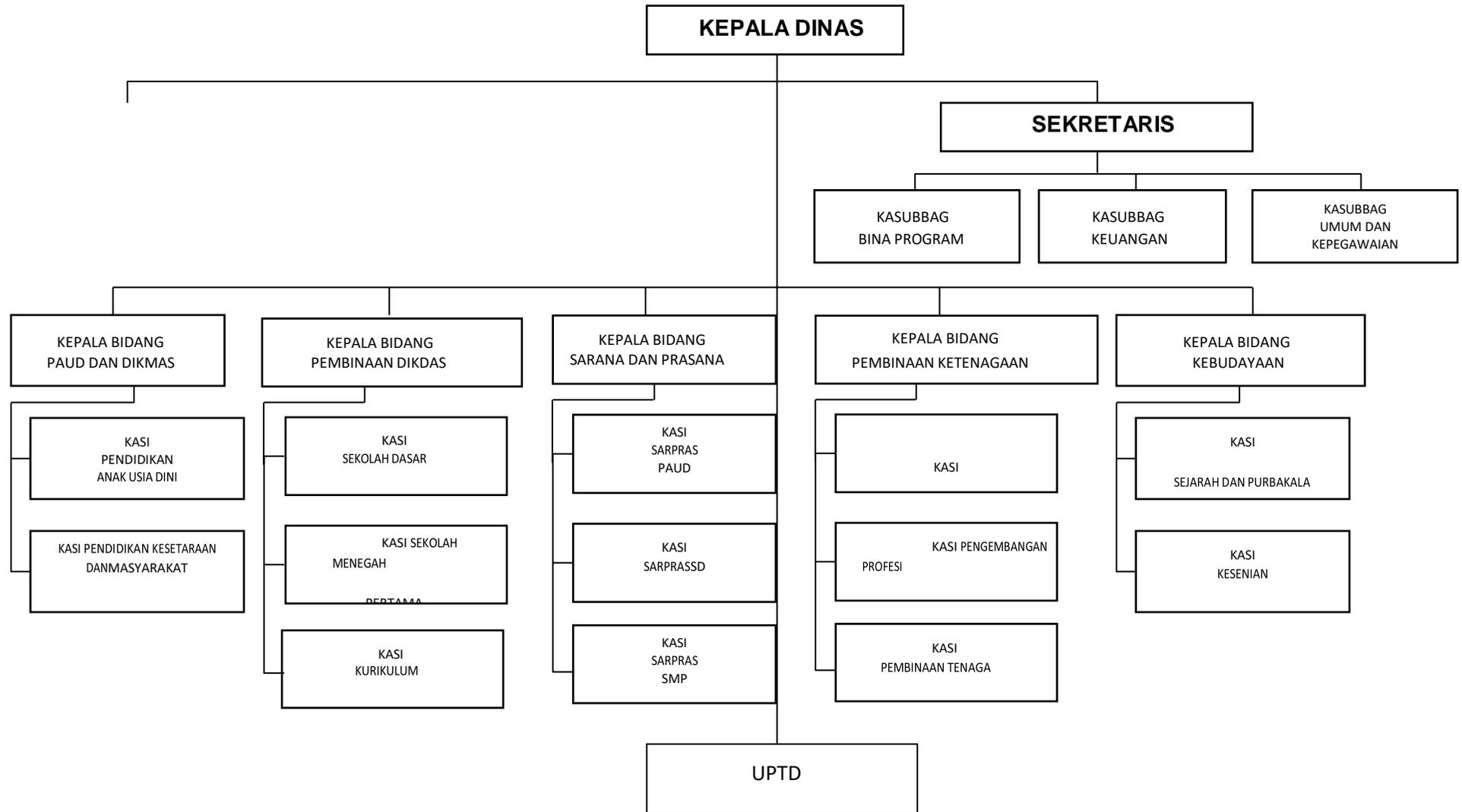
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan ketenagaan mempunyai fungsi;
  - a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembinaan tenaga pendidik;
  - b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan profesi tenaga pendidik;
  - c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, penempatan, pemberhentian dan pengembangan tenaga pendidik;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepala bidangketenagaan dibantu oleh :
  - a. Kepala Seksi Mutasi Tenaga Pendidik
  - b. Kepala Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik
  - c. Kepala Seksi Pembina Tenaga Pendidik

#### 2.1.7. Kepala Bidang Kebudayaan

Kepala Bidang kebudayaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- (1) Kepala Bidang kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan bidang kebudayaan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang kebudayaan mempunyai fungsi;
  - a. Merencanakan Program dan kegiatan bidang kebudayaan;
  - b. Menyusun rancangan kebijakan program dan kegiatan kebudayaan;
  - c. Menyelenggarakan program dan kegiatan seksi sejarah dan purbakala dan seksi kesenian sesuai dengan DPA;
  - d. Merumuskan penelitian, pengajian dan penulisan bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala;
  - e. Menyelenggarakan pemberian ijin rekomendasi bidang kebudayaan;

- f. Menyusun rancangan inovasi urusan pendidikan bidang kebudayaan berdasarkan identifikasi permasalahan dan Analisa;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepala bidang ketenagaan dibantu oleh :
- a. Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala
  - b. Kepala Seksi Kesenian
- 2.1.8. Kepala UPPK yang terdiri dari :
- a. Koordinator Wilayah Kecamatan (KWK) di 14 kecamatan yang memiliki tugas membantu pelaksanaan tugas urusan pendidikan pemuda dan olah raga di tingkat kecamatan.
  - b. Kepala SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas pendidikan nonformal dan informal.
- 2.1.9. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional.



## 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Keadaan Personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1) Personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten :

a. Kepala Dinas (eselon II b)	=	1 orang
b. Sekretaris Dinas (eselon III a)	=	1 orang
c. Kepala Bidang (eselon III b)	=	5 orang
d. Ka. Sub Bag /Kasi (eselon IV a)	=	16 orang
e. Pengawas SLTP	=	13 orang
f. Staf Administrasi	=	<u>65 orang</u>
<b>Jumlah</b>	=	<b>101 orang</b>

2) Personil Koordinator Wilayah Kecamatan (KWK) :

a. Kepala KWK (eselon IV a)	=	14 orang
b. Pengawas TK/SD (Jab. Fungsional)	=	76 orang
c. Staf Administrasi KWK	=	<u>148 orang</u>
<b>Jumlah</b>	=	<b>233 orang</b>

3) Personil sekolah :

a. Taman Kanak-kanak :

- Kepala TK	=	11 orang
- Guru TK	=	56 orang
- Guru Bantu TK	=	75 orang
- Guru Wiyata Bhakti TK	=	<u>10 orang</u>
<b>Jumlah</b>	=	<b>152 orang</b>

b. Sekolah Dasar :

- Kepala SD	=	775 orang
- Guru Kelas	=	6.167 orang
- Guru Penjaskes	=	675 orang
- Guru Agama	=	267 orang
- Guru Bantu Kelas	=	168 orang
- Guru Bantu Penjaskes	=	20 orang
- Guru Wiyata Bhakti	=	2.445 orang
- Penjaga SD	=	<u>301 orang</u>
<b>Jumlah</b>	<b>=</b>	<b>10.818 orang</b>

c. SMP :

- Kepala SMP	=	65 orang
- Guru SMP	=	1.826 orang
- Guru Wiyata Bhakti	=	985 orang
- Staf Administrasi	=	<u>480 orang</u>
<b>Jumlah</b>	<b>=</b>	<b>3.356 orang</b>

d. Tenaga Wiyata Bhakti :

- Tenaga Kontrak Dindikbud Kab. Pemalang	=	53 orang
- Wiyata Bhakti UPPK	=	35 orang
- Wiyata Bhakti SLTP	=	<u>530 orang</u>
<b>Jumlah =</b>		<b>618 orang</b>

## 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, dikemukakan sebagai berikut :

No	Nama Kantor	Jumlah (unit)	Alamat	Luas <sub>m<sup>2</sup></sub>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Jl. Merbabu No. 2 Pemalang	2.152
2	KWK Ulujami	1	Jl. Raya Ulujami	261
3	KWK Comal	1	Jl. Gatot Subroto No. 2 Comal	395
4	KWK Bodeh	1	Ds. Kebandaran Bodeh	590
5	KWK Ampelgading	1	Jl. Raya Ampelgading	700
6	KWK Petarukan	1	Jl. Raya Petarukan Barat	400
7	KWK Taman	1	Jl. Kolonel Sugiono No. 1	308,7
8	KWK Pemalang	1	Jl. Tentara Pelajar No. 1	528
9	KWK Bantarbolang	1	Jl. Raya Bantarbolang	289
10	KWK Randudongkal	1	Jl. Raya Randudongkal Km 1	535
11	KWK Moga	1	Jl. Bahagia No. 7 Moga	208
12	KWK Watukumpul	1	Jl. Raya Watukumpul 59	963
13	KWK Pulosari	1	Jl. Raya Pulosari Moga Km 6	2.510
14	KWK Belik	1	Jl. Serka Marmir Tolus Ujianto No. 23 Belik	521
15	KWK Warungpring	1	Jl. Raya Warungpring-Pekembaran	1.000
16	SKB Comal	1	Jl. Raya Sidorejo-Comal	23.660
17	Rumah Dinas	1	Jl. Raya Muria-Pemalang	258

a. Mobil	=	9 unit
b. Sepeda Motor	=	170 unit
c. Laptop	=	84 unit
d. LCD Projector	=	11 buah
e. Pesawat Telepon	=	17 buah
f. Fax Miles	=	2 buah
g. Komputer PC	=	68 unit
h. Printer	=	84 unit
i. AC	=	38 unit
j. Kamera	=	5 unit

k. Lemari	=	150 buah
l. Lemari Arsip	=	24 buah
m. Filling Kabinet	=	76 buah
n. Meja	=	379 buah
o. Kursi	=	815 buah
p. Kipas Angin	=	36 buah
q. Mesin Ketik	=	51 unit

Sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, keadaan Guru, Murid, Benda Cagar Budaya dan kelompok kesenian di Kabupaten Pemalang secara relative dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan untuk proses pembelajaran dan pelayanan kepada masyarakat. Gambaran jumlah sekolah, murid dan guru, dikemukakan sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Kab Pemalang**

<b>Tingkat pendidikan</b>	<b>Jumlah Sekolah</b>	<b>Jumlah Murid</b>	<b>Jumlah Guru</b>
PAUD	445	15.922	1.479
TK	354	18.030	1.461
RA	56	2.797	286
SD Negeri	718	132.351	4.573
SD Swasta	29	3.185	2.820
SMP Negeri	66	47.082	1.715
SMP Swasta	50	8.435	1.676
MI Negeri	2	1.138	250
MI Swasta	97	14.001	560
MTs Negeri	3	2.255	195
MTs Swasta	47	10.939	785
<b>J U M L A H</b>	<b>1.954</b>	<b>281.106</b>	<b>18.896</b>

**Tabel 2.2.**  
**Kondisi Ruang Kelas di Kab Pemalang Tahun 2020**

No	Kecamatan	TK			SD			SMP		
		B	R R	R B	B	RR	RB	B	RR	RB
01	Kec. Moga	28	0	0	109	66	14	30	43	8
02	Kec. Pulosari	10	0	0	80	83	7	49	8	0
03	Kec. Belik	52	0	0	194	88	29	31	28	18
04	Kec. Watukumpul	17	0	0	169	69	11	43	12	0
05	Kec. Bodeh	44	1	0	78	67	18	30	41	6
06	Kec. Bantarbolang	20	0	0	123	82	35	55	17	8
07	Kec. Randudongkal	43	1	0	117	130	21	39	71	45
08	Kec. Pemalang	86	1	0	396	204	16	182	72	52
09	Kec. Taman	84	0	0	148	329	5	77	128	20
10	Kec. Petarukan	81	1	0	238	142	31	285	129	59
11	Kec. Ampelgading	62	0	0	178	73	3	32	28	8
12	Kec. Comal	68	0	0	148	128	19	90	52	6
13	Kec. Ulujami	66	0	0	194	91	10	35	78	41
14	Kec. Warungpring	17	2	0	73	30	9	11	29	29
<b>Jumlah</b>		678	6	0	2245	1582	228	989	736	300

**Tabel 2.3.**  
**Benda Cagar Budaya di Kabupaten Pemalang Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Benda Cagar Budaya</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Keadaan</b>
1	Benda	12	Baik
2	Bangunan	23	Baik
3	Struktur	27	Baik
4	Situs	33	Baik
5	Kawasan	0	Baik
	<b>Jumlah</b>	<b>95</b>	<b>Baik</b>

**Tabel 2.4.**  
**Kesenian Tradisional di Kabupaten Pemalang**

<b>No</b>	<b>Kesenian Tradisional</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Keadaan</b>
1	Dalang/Wayang	50	Aktif
2	Tembang Jawa/Karawitan	81	Aktif
3	Sintren	20	Aktif
4	Kuda Kepang	16	Aktif
5	Campursari	25	Aktif
6	Sanggar Tari Tradisional	10	Aktif
7	Rebana	112	Aktif
8	Keroncong	16	Aktif
	<b>Jumlah</b>	<b>330</b>	<b>Aktif</b>

**Tabel 2.5.**  
**Perkembangan Kesenian Modern di Kabupaten Pemalang**

<b>No</b>	<b>Kesenian Modern</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Keadaan</b>
1	Organ Tunggal	59	Aktif
2	Orkes Dangdut	49	Aktif
3	Grup Band	56	Aktif
4	Sanggar Tari Modern	10	Aktif
5	Sanggar Modelling	4	Aktif
	<b>Jumlah</b>	<b>178</b>	<b>Aktif</b>

## **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan**

### **2.3.1. Pelayanan Pendidikan**

Perincian urusan kewenangan pendidikan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diserahkan pengelolaan Pendidikan, sebagai sebagai berikut :

1. Pengelolaan pendidikan dasar.
2. Pengelolaan pendidikan usia dinidan pendidikan non formal;
3. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
4. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/ kota;
5. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
7. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota.

### **2.3.2. Pelayanan Kebudayaan**

Perincian urusan kebudayaan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dinyatakan sebagai berikut :

1. Pengelolaan kebudayaan, masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota;
4. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota;
5. Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota;
6. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota;

7. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota;
8. Penerbitan izin membawa;
9. Cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
10. Pengelolaan museum kabupaten/kota.

Berdasarkan perincian kewenangan tersebut maka dapat dikemukakan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016-2021 dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

**Tabel 2.6.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Kinerja Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata lama sekolah	-	5,87	-	5,87	5,88	5,89	5,9	5,91	5,92	6,04	6,31	6,32	6,41	6,42	-	102,90%	107,31%	107,30%	108,64%	108,63%	0,00%
2	Harapan Lama Sekolah	-	11,26	-	11,41	11,56	11,71	11,86	12,01	12,16	11,86	11,88	11,59	11,94	11,95	-	103,94%	102,77%	98,98%	100,67%	99,50%	0,00%
3	Angka Kelulusan SD/MI	-	100	-	100	100	100	100	10	10	100	100	100,65	100	100	-	100,00%	100,00%	100,65%	100,00%	1000,00%	0,00%
4	Angka Kelulusan SMP/Mts	-	100	-	100	100	100	100	10	10	100	100	96,76	100	100	-	100,00%	100,00%	96,76%	100,00%	1000,00%	0,00%
5	Angka Melanjutkan SD/MI	-	98,65	-	98,45	98,48	98,51	98,54	98,57	98,6	98,58	98,5	98,53	109,9	109,9	-	100,13%	100,02%	100,02%	111,53%	111,49%	0,00%
6	Angka Melanjutkan SMP/MTs	-	87,6	-	87,7	87,8	87,9	88	88,1	88,2	88,28	87,82	87,91	88,03	88,03	-	100,66%	100,02%	100,01%	100,03%	99,92%	0,00%
7	Angka Partisipasi Warga Negara Usia 4-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD	-	80	-	56,68	58,58	60,98	64,08	67,48	100	56,68	58,58	75,22	75	70	-	100%	100%	123%	117%	103,7%	0,00%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Kinerja Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8	Angka Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam SD/MI	-	107	-	107	107,5	108	108,5	109	100	96,92	100,4	108	95	95,8	-	90,6%	93,4%	100%	87,6%	87,89%	0,00%
9	Angka Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam SMP/MTs	-	80	-	80	82	83	85	87	100	80,69	81,76	83,01	74,81	74,81	-	101%	99,71%	100%	88%	85,99%	0,00%
10	Cakupan kelompok seni yang aktif	-	30	-	32	35	38	41	44	47	32	37	83	84,74	65	-	100,00%	105,71%	218,42%	206,68%	147,73%	0,00%
11	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	58	-	59	61	63	67	69	69	61	83	90	91,3	90,52	-	103,39%	136,07%	142,86%	136,27%	131,19%	0,00%

Berdasarkan perincian yang telah dikemukakan pada tabel diatas maka diketahui capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 8 Indikator terdiri dari 6 indikator urusan Pendidikan dan 2 Indikator urusan Kebudayaan, Indikator diatas masuk kedalam IKK, juga termasuk IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Dalam beberapa tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mencapai target yang di tentukan dan terdapat indikator yang melampaui target.
- c. Terdapat 2 Indikator dengan rasio di bawah 100% dikarenakan belum sepenuhnya mencapai target. Terutama pada tahun 2020 pada indikator Harapan Lama Sekolah, dan Angka Melanjutkan SMP/MTs belum tercapai
- d. Ditahun 2018 terdapat 2 indikator yang belum tercapai (dibawah 100%) yaitu indikator Harapan Lama Sekolah dan Angka Kelulusan SMP/MTs.

Tabel 2.7.

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang

(Dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.180.684	1.886.570	2.687.589	2.502.600	1.630.886	1.180.684	1.774.460	2.497.950	2.394.949	1.617.154	100%	94%	93%	96%	99%	38	37
Penyediaan jasa surat menyurat	7.050	27.400	4.050	6.000	5.850	7.050	16.470	3.264	2.490	5.850	100%	60%	81%	42%	100%	(17)	(17)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	163.890	214.000	282.400	242.400	296.000	163.890	196.130	233.999	232.343	294.000	100%	92%	83%	96%	99%	81	79
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	46.000	55.700	-	-	-	46.000	50.600	-	-	-	100%	91%	0%	0%	0%	(100)	(100)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.563	17.000	20.000	20.000	16.000	5.563	10.945	15.833	14.211	16.000	100%	64%	79%	71%	100%	188	188
Penyediaan jasa administrasi keuangan	184.791	207.318	220.000	230.000	75.483	184.791	190.254	209.559	220.917	75.460	100%	92%	95%	96%	100%	(59)	(59)
Penyediaan jasa kebersihan kantor	11.013	33.600	48.400	38.200	47.700	11.013	29.600	44.716	36.470	47.700	100%	88%	92%	95%	100%	333	333
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		-	0	-	-		-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	-	-
Penyediaan alat tulis kantor	101.500	110.000	118.850	131.600	154.500	101.500	109.742	117.061	129.659	154.500	100%	100%	98%	99%	100%	52	52
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	117.425	170.000	164.500	164.500	151.250	117.425	161.956	156.192	158.475	151.250	100%	95%	95%	96%	100%	29	29
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19.000	20.000	110.000	10.000	10.000	19.000	16.211	106.770	9.445	10.000	100%	81%	97%	94%	100%	(47)	(47)
Penyediaan peralatan rumah		22.000		25.000	28.600						100%	89%	94%	86%	100%		

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
tangga	6.925		27.000			6.925	19.501	25.443	21.434	28.600						313	313
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	39.116	50.000	164.000	63.400	67.000	39.116	43.543	142.557	46.670	67.000	100%	87%	87%	74%	100%	71	71
Penyediaan makanan dan minuman	97.980	173.057	201.200	164.500	157.825	97.980	157.018	165.657	150.139	157.759	100%	91%	82%	91%	100%	61	61
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah	260.096	600.000	673.989	700.000	248.566	260.096	593.435	668.988	698.790	248.381	100%	99%	99%	100%	100%	(4)	(5)
Penyediaan Jasa Keamanan		14.400	53.200	57.000	46.600		10.200	42.010	24.725	35.528	0%	71%	79%	43%	76%	-	-
Rapat – rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	120.335	172.095	600.000	650.000	325.513	120.335	168.855	565.803	649.181	325.127	100%	98%	94%	100%	100%	171	170
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.054.606	1.922.075	2.093.353	3.572.281	458.995	1.054.606	1.841.878	1.957.584	802.466	455.763	100%	96%	94%	22%	99%	(56)	(57)
Pembangunan gedung kantor	198.375	180.000	557.000	2.600.000	-	198.375	179.855	556.653	97.615	-	100%	100%	100%	4%	0%	(100)	(100)
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	1.141.750	103.350	27.000	-	-	1.121.975	101.947	26.550	-	0%	98%	99%	98%	0%	-	-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	58.180	79.125	140.350	137.000	55.500	58.180	68.093	128.444	133.302	55.500	100%	86%	92%	97%	100%	(5)	(5)
Pengadaan peralatan gedung kantor	409.182	140.000	86.550	-	-	409.182	129.620	83.129	-	-	100%	93%	96%	0%	0%	(100)	(100)
Pengadaan mebeleur	113.750	82.000	120.700	-	-	113.750	75.805	116.690	-	-	100%	92%	97%	0%	0%	(100)	(100)
Pengadaan komputer dan perlengkapannya			176.650	240.000	91.350			145.416	62.600	91.350	0%	0%	82%	26%	100%	-	-
Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	25.000	10.000	10.273	9.719	10.000	100%	100%	103%	97%	100%	(60)	(60)

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	154.290	118.700	267.000	235.156	84.145	154.290	118.668	262.069	222.516	81.241	100%	100%	98%	95%	97%	(45)	(47)
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	30.755	48.250	48.400	40.000	48.500	30.755	38.430	39.355	30.388	48.302	100%	80%	81%	76%	100%	58	57
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	39.374	60.000	47.400	60.000	42.000	39.374	44.042	33.964	38.736	41.870	100%	73%	72%	65%	100%	7	6
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	15.000	27.250	10.000	10.000	25.000	15.000	26.750	9.539	9.998	24.999	100%	98%	95%	100%	100%	67	67
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	10.700	35.000	30.000	20.000	35.000	10.700	28.640	13.533	18.993	35.000	100%	82%	45%	95%	100%	227	227
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja			93.800	37.000	67.500			76.878	24.850	67.500	0%	0%	82%	67%	100%	-	-
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			402.153	156.125	-			379.693	127.200	-	0%	0%	94%	81%	0%	-	-
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.260	17.500	170.000	175.000	48.760	13.260	36.677	149.772	151.667	47.410	100%	210%	88%	87%	97%	268	258
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Diknas	9.205	10.000	105.000	70.000	5.230	9.205	9.250	95.283	69.990	5.230	100%	93%	91%	100%	100%	(43)	(43)
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	4.055	7.500	15.000	20.000	10.080	4.055	7.462	14.692	19.175	9.171	100%	99%	98%	96%	91%	149	126
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		20.000	25.000	30.000	20.000		19.965	25.017	29.382	19.929	0%	100%	100%	98%	100%	-	-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan			25.000	55.000	13.450			14.800	33.120	13.080	0%	0%	59%	60%	97%	-	-
Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	1.102.042	791.901	898.530	1.110.000	761.525	1.102.042	697.841	809.669	999.974	754.111	100%	88%	90%	90%	99%	(31)	(32)

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan database perencanaan SKPD	47.579	125.000	130.000	455.000	297.000	47.579	101.209	116.326	406.214	296.789	100%	81%	89%	89%	100%	524	524
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	12.789	29.684	63.000	125.000	56.525	12.789	25.856	58.654	120.374	56.524	100%	87%	93%	96%	100%	342	342
Penyusunan database Pelaksanaan Kegiatan, Pelaksanaan Pembangunan tingkat Kabupaten	1.041.674	637.217	705.530	530.000	408.000	1.041.674	570.776	634.689	473.386	400.797	100%	90%	90%	89%	98%	(61)	(62)
Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.059.490	5.614.079	8.566.822	8.283.748	8.048.379	3.059.490	5.046.693	8.388.845	7.904.165	7.912.675	100%	90%	98%	95%	98%	163	159
Pembangunan gedung sekolah	634.686	1.573.124	2.283.000	1.754.500	1.267.433	634.686	1.294.652	2.256.101	1.669.889	1.245.771	100%	82%	99%	95%	98%	100	96
Pembangunan sarana dan prasarana bermain	-	165.495	220.262	267.150	-	-	155.732	214.166	258.110	-	0%	94%	97%	97%	0%	-	-
Pengadaan mebeleur sekolah		296.985	189.000	164.150	-		279.852	186.145	156.685	-	0%	94%	98%	95%	0%	-	-
Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah	388.519	861.170	1.435.000	1.032.788	474.236	388.519	833.290	1.405.699	1.017.201	463.273	100%	97%	98%	98%	98%	22	19
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (APBD I)	1.983.190	2.529.055	4.251.310	4.808.910	6.185.510	1.983.190	2.310.651	4.139.929	4.565.690	6.087.672	100%	91%	97%	95%	98%	212	207
Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan Anak Usia Dini	-	56.250	56.250	56.250	23.000	-	52.320	56.302	53.950	21.425	0%	93%	100%	96%	93%	-	-
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (APBD I)	53.095	132.000	132.000	200.000	98.200	53.095	120.196	130.502	182.640	94.534	100%	91%	99%	91%	96%	85	78
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	26.988.236	60.015.908	221.168.716	206.401.880	197.594.354	26.988.236	53.064.925	206.655.710	197.925.649	193.512.470	100%	88%	93%	96%	98%	632	617

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (APBD I)	711.745	375.920	2.672.000	-	-	711.745	366.061	167.554	-	-	100%	97%	6%	0%	0%	(100)	(100)
Penambahan ruang kelas sekolah SD/MI	532.890	4.036.500	4.323.148	2.746.000	1.715.418	532.890	3.738.980	4.187.352	2.670.758	1.702.289	100%	93%	97%	97%	99%	222	219
Penambahan ruang kelas sekolah SMP/MTs	-	4.242.064	2.184.160	2.346.000	1.485.984	-	4.126.423	1.986.879	2.280.514	1.386.326	0%	97%	91%	97%	93%	-	-
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah SMP/MTs	-	1.014.498	220.000	379.050	-	-	1.005.859	215.805	373.812	-	0%	99%	98%	99%	0%	-	-
Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/MI	642.570	3.296.470	2.335.000	-	741.185	642.570	3.253.775	2.295.220	-	729.339	100%	99%	98%	0%	98%	15	14
Pengadaan Buku-buku dan AlatTulis Siswa SD/MI	392.250	4.878.250	220.000	77.000	22.000	392.250	312.896	216.805	76.055	22.000	100%	6%	99%	99%	100%	(94)	(94)
Pengadaan Buku-buku dan AlatTulis Siswa SMP/MTs	202.729	384.580	6.119.720	-	-	202.729	355.992	38.714	-	-	100%	93%	1%	0%	0%	(100)	(100)
Pengadaan alat praktik dan peraga SD/MI	-	-	127.958	-	556.100	-	-	126.546	-	424.364	0%	0%	99%	0%	76%	-	-
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMP/MTs	1.310.003	300.000	6.213.942	6.200.000	1.994.375	1.310.003	294.497	6.177.435	6.123.292	36.920	100%	98%	99%	99%	2%	52	(97)
Pengadaan meubelair sekolah SD/MI	719.898	1.942.667	1.547.400	268.974	-	719.898	954.502	1.478.061	265.156	-	100%	49%	96%	99%	0%	(100)	(100)
Pengadaan meubelair sekolah SMP/MTs	111.486	885.000	268.000	254.000	45.300	111.486	844.565	264.851	249.108	42.243	100%	95%	99%	98%	93%	(59)	(62)
Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah SD (DAK)	15.161.543	30.566.450	35.467.310	31.842.834	11.478.626	15.161.543	30.107.591	34.164.407	30.873.267	11.335.718	100%	98%	96%	97%	99%	(24)	(25)
Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah SMP/MTs (DAK)	5.403.541	5.044.829	2.863.424	4.026.768	7.431.768	5.403.541	4.888.932	2.767.545	3.944.049	7.193.505	100%	97%	97%	98%	97%	38	33
Pemberian beasiswa SD dan SMP	-	810.457	800.000	800.000	21.150	-	804.864	799.894	779.927	11.450	0%	99%	100%	97%	54%	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/SDLB dan SMP	306.619	382.162	950.480	700.000	832.571	306.619	365.258	926.413	671.220	831.526	100%	96%	97%	96%	100%	172	171
Penyelenggaraan Paket A setara SD	10.600	13.800	10.800	60.000	16.125	10.600	13.755	10.824	60.000	16.125	100%	100%	100%	100%	100%	52	52
Penyelenggaraan Paket B setara SMP	104.271	119.900	100.000	359.000	158.942	104.271	97.830	87.252	339.340	154.322	100%	82%	87%	95%	97%	52	48
Pembinaan Minat, Bakat dan kreatifitas Siswa SD/MI	287.850	312.500	300.000	395.000	42.105	287.850	287.850	299.871	394.959	42.105	100%	92%	100%	100%	100%	(85)	(85)
Pembinaan Minat, Bakat dan kreatifitas Siswa SMP/MTs	253.629	225.445	330.000	310.000	87.950	253.629	150.305	281.287	306.632	32.292	100%	67%	85%	99%	37%	(65)	(87)
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SD/MI	30.515	265.000	178.096	975.000	1.196.207	30.515	228.884	164.647	875.792	880.706	100%	86%	92%	90%	74%	3.820	2.786
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar SMP/MTs	40.000	145.170	400.000	230.000	732.599	40.000	143.949	395.057	201.668	656.177	100%	99%	99%	88%	90%	1.731	1.540
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	30.000	49.750	100.000	100.000	47.400	30.000	49.078	96.534	84.864	29.910	100%	99%	97%	85%	63%	58	(0)
Penyelenggaraan ujian siswa SD/MI	620.417	231.000	389.448	505.000	300.145	620.417	208.165	356.508	469.848	279.150	100%	90%	92%	93%	93%	(52)	(55)
Penyelenggaraan ujian siswa SMP/MTs	-	373.496	385.000	500.000	196.800	-	353.594	363.087	425.394	194.312	0%	95%	94%	85%	99%	-	-
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SMP	115.680	120.000	249.750	275.000	210.000	115.680	111.320	236.548	253.348	209.434	100%	93%	95%	92%	100%	82	81

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	-	151.582.160	152.413.081	153.052.254	168.281.606	-	145.536.798	148.696.151	146.206.647	167.302.258	0%	96%	98%	96%	99%	-	-
Program Pendidikan Menengah	120.400	158.800	200.000	864.200	537.100	120.400	133.120	98.106	839.250	525.300	100%	84%	49%	97%	98%	346	336
Penyelenggaraan Paket C setara SMU	120.400	158.800	200.000	864.200	537.100	120.400	133.120	98.106	839.250	525.300	100%	84%	49%	97%	98%	346	336
Program Pendidikan Non Formal	976.931	561.200	702.500	1.378.950	1.803.671	976.931	481.847	593.580	1.296.622	1.706.599	100%	86%	84%	94%	95%	85	75
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	540.995	229.950	333.000	365.000	239.800	540.995	172.770	238.860	320.172	208.063	100%	75%	72%	88%	87%	(56)	(62)
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	424.936	320.750	318.750	400.000	189.650	424.936	298.577	304.549	399.400	189.650	100%	93%	96%	100%	100%	(55)	(55)
Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan non formal	11.000	10.500	50.750	80.000	92.990	11.000	10.500	50.172	66.350	92.979	100%	100%	99%	83%	100%	745	745
Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana pendidikan non formal	-	-	-	533.950	1.281.231	-	-	-	510.700	1.215.907	0%	0%	0%	96%	95%	-	-
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	5.340.474	6.627.222	7.034.875	6.456.724	15.803.550	5.340.474	6.188.942	6.403.085	5.965.015	15.229.301	100%	93%	91%	92%	96%	196	185
Pelaksanaan sertifikasi pendidik	147.706	170.000	180.000	305.000	64.000	147.706	167.439	177.736	300.027	64.000	100%	98%	99%	98%	100%	(57)	(57)
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	162.211	164.348	187.430	188.000	15.700	162.211	154.335	187.726	187.010	15.700	100%	94%	100%	99%	100%	(90)	(90)
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	-	543.500	452.371	-	-	-	520.091	298.837	-	-	0%	96%	66%	0%	0%	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	43.750	66.000	51.000	60.000	44.150	43.750	65.900	50.810	46.437	30.150	100%	100%	100%	77%	68%	1	(31)
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	52.000	17.000	17.000	17.000	-	52.000	17.000	16.229	16.450	-	100%	100%	95%	97%	0%	(100)	(100)
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	4.715.189	5.225.745	5.705.945	5.336.924	15.454.200	4.715.189	4.859.772	5.239.680	4.921.064	14.910.370	100%	93%	92%	92%	96%	228	216
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	41.087	99.500	100.000	100.000	55.500	41.087	89.447	97.270	94.994	55.006	100%	90%	97%	95%	99%	35	34
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	-	50.000	50.000	105.000	74.000	-	35.357	46.988	71.072	73.100	0%	71%	94%	68%	99%	-	-
Pendataan tenaga pendidik dan kependidikan untuk kenaikan pangkat	178.531	291.129	291.129	344.800	96.000	178.531	279.601	287.810	327.961	80.975	100%	96%	99%	95%	84%	(46)	(55)
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	205.961	389.845	737.370	1.542.416	330.000	205.961	361.587	693.507	1.527.103	284.343	100%	93%	94%	99%	86%	60	38
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	-	90.000	392.370	1.152.416	95.000	-	79.960	354.188	1.148.216	50.218	0%	89%	90%	100%	53%	-	-
Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	162.211	25.000	25.000	25.000	-	162.211	22.700	23.597	24.994	-	100%	91%	94%	100%	0%	(100)	(100)
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	43.750	274.845	235.000	290.000	235.000	43.750	258.927	231.837	280.973	234.125	100%	94%	99%	97%	100%	437	435
Penyelenggaraan Hari Besar Nasional Pendidikan	-	-	85.000	75.000	-	-	-	83.885	72.920	-	0%	0%	99%	97%	0%	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengembangan Nilai Budaya			100.000	165.000	174.000			95.225	143.245	144.561	0%	0%	95%	87%	83%	-	-
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah			100.000	165.000	174.000			95.225	143.245	144.561	0%	0%	95%	87%	83%	-	-
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.416.840.000	9.257.160	3.642.000	1.672.500	1.397.429	1.416.840.000	6.423.206	4.326.396	1.443.261	1.068.277	100%	69%	119%	86%	76%	(100)	(100)
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	-	90.000	157.000	172.000	15.107	-	70.130	123.064	154.100	8.735	0%	78%	78%	90%	58%	-	-
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	-	-	120.000	120.000	113.000	-	-	103.024	86.635	70.858	0%	0%	86%	72%	63%	-	-
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	-	52.360	175.000	100.000	8.439	-	35.132	167.710	84.842	3.714	0%	67%	96%	85%	44%	-	-
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	41.453.000	5.806.800	392.000	400.000	1.063.500	41.453.000	4.102.514	405.968	371.847	836.846	100%	71%	104%	93%	79%	(97)	(98)
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	35.885.000	1.550.000	2.238.000	461.500	20.000	35.885.000	1.112.243	1.801.701	421.559	18.700	100%	72%	81%	91%	94%	(100)	(100)
Pengembangan nilai dan geografi sejarah	19.685.000	238.000	265.000	227.220	72.650	19.685.000	65.007	168.793	166.386	42.180	100%	27%	64%	73%	58%	(100)	(100)
Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala	-	-	245.000	155.000	71.170	-	-	204.423	135.413	54.506	0%	0%	83%	87%	77%	-	-
Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya		-	50.000	36.780	33.563	-	-	30.860	22.480	32.739	0%	0%	62%	61%	98%	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	659.908.500	760.000	667.500	955.000	548.525	659.908.500	519.090	1.119.318	801.754	459.225	100%	68%	168%	84%	84%	(100)	(100)
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	47.590.000	527.000	307.500	525.000	89.000	47.590.000	354.753	305.573	472.997	65.772	100%	67%	99%	90%	74%	(100)	(100)
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	150.150.000	128.000	195.000	200.000	369.525	150.150.000	99.867	270.602	168.700	326.893	100%	78%	139%	84%	88%	(100)	(100)
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	462.168.500	105.000	100.000	150.000	50.000	462.168.500	64.470	503.863	111.889	34.018	100%	61%	504%	75%	68%	(100)	(100)
Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	-	-	65.000	80.000	40.000	-	-	39.280	48.168	32.543	0%	0%	60%	60%	81%	-	-
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	291.399.980	390.140	0	-	-	291.399.980	90.140	291.490	-	-	100%	23%	0%	0%	0%	(100)	(100)
Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta	291.399.980	390.140	0	-	-	291.399.980	90.140	-	-	-	100%	23%	0%	0%	0%	(100)	(100)

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang**

### **2.4.1. Tantangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

#### **1. Pendidikan**

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang yang semakin meningkat dan bonus demografi tahun 2020 – 2030 akan menambah jumlah penduduk usia produktif (usia 15 sampai 65 tahun) sehingga memerlukan pelayanan pendidikan yang lebih baik/tinggi yaitu capaian Wajib Belajar 12 tahun. Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Pemalang masih rendah setara lulus Sekolah Dasar (SD) atau sebanding 6,41 tahun (rata-rata Jawa Tengah 7,69 tahun) dan HLS sebesar 11,95 tahun setingkat hampir kelas 12 pada tingkat SLTA (lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 12,70 tahun);
- 2) Kurikulum untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dengan Merdeka Belajar, agar lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dunia usaha dunia industri (DUDI), terampil dan cakap serta berakhak mulia.
- 3) Belum semua Guru PAUD berkualifikasi Sarjana/Diploma S1/DIV sesuai Permendikbud Nomor 16 tahun 2007.
- 4) Ketersediaan sarana dan parasarana pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP belum memadai baik ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang guru dan sanitasi sekolah sesuai dengan SPM Pendidikan;
- 5) Fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum ada Kecamatan Pulosari, Watukumpul dan Warungpring yang mempengaruhi minat sekolah kelompok usia (15 – 17 tahun).
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar lembaga pendidikan pada tingkat daerah, regional maupun nasional

berkaitan dengan kemajuan pendidikan.

## **2. Kebudayaan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan terdapat tantangan pembangunan sebagai berikut :

1. Melemahnya ketahanan budaya sebagai dampak pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi informatika dan akses internet;
2. Terdapat ancaman rawan bencana dan pencemaran lingkungan di Kawasan cagar budaya dan melemahkan pelestarian cagar dan peninggalan budaya.
3. Belum optimalnya kerjasama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang menjadi jatidiri masyarakat Pematang Jaya.
4. Tantangan informasi dan komunikasi global, dengan makin mudahnya mengakses informasi melalui internet, yang berdampak pada tata pergaulan generasi muda, pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah;

### **2.4.2. Peluang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

#### **1. Pendidikan**

Peluang dalam pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut :

- 1) Prioritas pembangunan sumberdaya manusia terutama Pendidikan dan kebudayaan menjadi prioritas kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 terutama dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing agar siap memasuki pasar kerja di dunia usaha dan dunia industri/jasa.
- 2) Pelaksanaan Program Merdeka Belajar berdasarkan Permendikbud

Nomor 22 Tahun 2020 menjadi langkah dinamis mewujudkan Wajib Belajar 12 tahun secara nasional.

- 3) Pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan dari PAUD, sekolah dasar dan menengah menjadi faktor pendorong pengembangan Pendidikan formal dan Pendidikan kesetaraan.
- 4) Peluang kerjasama pemerintah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Pusat dalam memacu perkembangan Pendidikan di desa dan Kawasan perbatasan yang akses Pendidikannya rendah.

## **2. Kebudayaan :**

Peluang dalam pembangunan bidang kebudayaan di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut

- 1) Meningkatnya perhatian tentang pengembangan budaya literasi dan peran keluarga/masyarakat dalam pembangunan seni budaya terkait erat dengan visi pembangunan di Kabupaten Pemalang.
- 2) Meningkatnya perhatian terhadap pembangunan budaya dan penerapan system informasi pendataan warisan budaya baik yang bersifat benda maupun warisan budaya tak benda dan menggalang partisipasi masyarakat pada umumnya.
- 3) Meningkatnya perhatian pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan, peningkatan ketahanan budaya dan pemajuan kebudayaan sebagai jatidiri bangsa.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

##### **a. Permasalahan Sekretariat**

- 1) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- 2) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- 3) Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset/barang milik daerah (BMD);

##### **b. Permasalahan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar**

- 1) Rata-rata Pendidikan penduduk masih rendah (setara llulus SD/sederajat)
- 2) Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dasar di Kabupaten Pemalang.
- 3) Belum optimalnya pelayanan Pendidikan bagi anak usia sekolah secara merata.

##### **c. Permasalahan Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)**

- 1) Capaian kinerja PAUD yang memenuhi ketentuan masih rendah.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana PAUD yang memenuhi ketentuan SPM Pendidikan.
- 3) Belum optimalnya tenaga pendidik yang sesuai Kualifikasi (D-IV dan S1).

##### **d. Permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana**

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan belum merata di semua kecamatan, termasuk sekolah lanjutan (SMK/SMK).
- 2) Ketersediaan ruang kelas SD/Mts yang sesuai SNP masih rendah (29,54%) dan SMP/MTS mencapai sebesar 34,08% belum sesuai SPM 100%.

- 3) Sarana dan prasarana perpustakaan, ruang UKS dan laboratorium sekolah belum merata di SMP.

**e. Permasalahan Bidang Ketenagaan**

- 1) Belum optimalnya ketersediaan tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi D-IV/Sarjana dan bersertifikasi masih rendah (pada tahun 2020 sebesar 36,21%).
- 2) Belum optimalnya tenaga kependidikan sesuai kualifikasi untuk tenaga perpustakaan, kearsipan dan tenaga administrasi menguasai teknologi informatika (TI) untuk pelayanan pembelajaran daring.

**f. Permasalahan Bidang Kebudayaan**

- 1) Belum optimalnya pendataan dan upaya pelestarian cagar budaya (inventarisasi baru mencapai 59 obyek warisan budaya) di Kabupaten Pemalang.
- 2) Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi pelestarian seni budaya (2020) kelompok seni budaya yang aktif sebesar 83,33% saja.
- 3) Pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dan pengelolaan kekayaan budaya masih terbatas (capaian 2020 sebesar 90,52%).

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026**

Berdasarkan Visi pembangunan jangka menengah dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Visi pembangunan jangka menengah daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pemalang dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**.

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) Adil, (2) Makmur, (3) Agamis, (4) Ngangeni. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2021-2026. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

#### **1. Adil**

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pematang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya

#### **2. Makmur**

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pematang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

#### **3. Agamis**

Agamis adalah kondisi Kabupaten Pematang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

#### **4. Ngangeni**

Ngangeni adalah kondisi Kabupaten Pematang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pematang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pematang itu ngangeni”*

## **Misi Pembangunan Jangka Menengah**

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Rumusan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut.

### **1. Misi pertama Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Pematang Jaya yang masyarakatnya memiliki rasa aman, tenteram dan tertib dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rasa aman yang dimiliki masyarakat meliputi aman dari: (a) ancaman politik; (b) ancaman bencana; dan (c) ancaman ketertiban dan ketenteraman perlindungan masyarakat.

Bentuk dari ancaman politik antara lain Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik; Pelanggaran HAM; isu politik. (catatan: konflik SARA dapat dikaitkan dengan kemunculannya pada saat Pemilu, Pilpres, Pilkada). Dekriminalisasi. Ancaman bencana, meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.

### **2. Misi kedua Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi budaya malu dan merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan, demokratis, transparan dan akuntabel. Birokrasi yang responsive dijalankan oleh aparatur yang memiliki mindset sebagai pelayan masyarakat, profesional dengan sistem kerja yang terukur, memiliki etos kerja yang baik, kreatif, dan inovatif.

Pemerintah harus mewujudkan pelayanan public yang prima dengan mengedepankan kemudahan akses dan transparansi

3. Misi ketiga **Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan karakter masyarakat Kabupaten Pematang Jaya yang menerapkan nilai-nilai agama dalam laku hidup sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan melalui internalisasi dan implementasi nilai-nilai agama, etika, budi pekerti, toleransi dan kecintaan pada budaya bangsa serta meneguhkan peran pondok pesantren dan lembaga pendidikan dalam membangun karakter masyarakat. Selain itu misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dalam hal pendidikan dan kesehatan serta mengurangi kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan.

4. Misi keempat **Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Kegiatan pembangunan perkotaan harus saling melengkapi dan saling terkait dengan wilayah perdesaan. Perubahan paradigma dalam pembangunan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi. Menjadikan desa sebagai pusat-pusat pembangunan dan motor utama penggerak roda perekonomian. Upaya keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan ditempuh melalui percepatan, peningkatan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penataan kawasan perkotaan (Program Unggulan: DEDI, DESI)

5. Misi kelima **Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pematang Jaya meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi

kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. (Program Unggulan: DEWI, KOIN)

6. Misi Keenam **Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan infrastruktur yang mantap dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang Jaya mengarah pada pencapaian unsur visi pembangunan daerah sesuai dengan misi misi ke tiga yaitu : Misi ketiga Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong. Sesuai dengan rumusan tujuan dan sasaran misi 3 yang akan dicapai adalah :

Misi	Tujuan	Sasaran
<p>Misi 3 :</p> <p>Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong</p>	<p>Tujuan 1 :</p> <p>Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing</p>	<p>Sasaran :</p> <p>1) Meningkatnya kualitas Pendidikan yang berdayasaing</p> <p>2) Meningkatkan nilai-nilai budaya dan toleransi dan karakter bangsa</p>
		<p>Sasaran</p> <p>Sasaran :</p> <p>1) Meningkatnya pelestarian budaya;</p> <p>2) Meningkatnya kualitas budaya literasi di masyarakat</p>

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, dikemukakan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3 : Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong.	1) Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan di seluruh wilayah. 2) Belum optimalnya peningkatan kapasitas tenaga Pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai kompetensi	1) Kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan belum merata seluruh wilayah. 2) Kondisi sarana dan prasarana pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan menengah belum memenuhi standar SPM	1) Komitmen dan dukungan dari Bupati dan DPRD terhadap peningkatan pendidikan dan pengembangan budaya daerah cukup baik.
2	Tujuan : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	3) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pendidikan PAUD dan kesetaraan. 4) Tata kelola dan penyelenggaraan manajemen pendidikan belum mantab	3) Kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan anak masih kurang. 4) Sinergitas antar stakeholder yang mendukung pendidikan sepanjang hayat belum optimal	2) Dukungan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam peningkatan Pendidikan meningkat berdasarkan PP No 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP.
3	Sasaran : 1) :Meningkatnya kualitas Pendidikan yang berdayasaing 2) Meningkatkan nilai-nilai budaya dan toleransi dan karakter bangsa  Sasaran : 1) Meningkatkan pelestarian budaya; 2) Meningkatkan kualitas budaya literasi di masyarakat	5) Belum optimalnya pelestarian cagar budaya. 6) Kurangnya sumberdaya manusia berkompetensi pamong budaya. 7) Belum semua kelompok kesenian mendapatkan pembinaan dan aktif.		3) Meningkatnya peran dunia usaha dan peran masyarakat dalam Pendidikan meningkat. 4) Kerjasama dengan Provinsi dan Pusat dalam pembangunan kebudayaan.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan (1) Renstra Kebudayaan dan Provinsi Jawa Tengah**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga (K/L)**

##### **1. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 – 2024, dikemukakan tentang lima (5) sasaran pembangunan Pendidikan dan kebudayaan dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024, sebagai berikut :

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama — Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua — Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima — Penguatansistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan**  
**Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.	1) Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan di seluruh wilayah. 2) Belum optimalnya peningkatan kapasitas tenaga Pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai kompetensi	1) Kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan belum merata seluruh wilayah. 2) Kondisi sarana dan prasarana pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan menengah belum memenuhi standar SPM 3) Kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan anak masih kurang. 4) Sinergitas antar stakeholder yang mendukung pendidikan sepanjang hayat belum optimal	1) Komitmen Bupati dan DPRD dalam pembangunan pendidikan baik. 2) Peluang dan potensi kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam pembangunan pendidikan dan budaya. 3) Dukungan Pemerintah Pusat bagi peningkatan pendidikan dan kebudayaan semakin baik 4) Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun banyak difasilitasi Provinsi dan Pusat.
2	Penguatan mutu dan relevansi Pendidikan yang berpusat pada relevansi perkembangan peserta didik adalah meningkatnya relevansi Pendidikan di seluruh jenjang	3) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pendidikan PAUD dan kesetaraan. 4) Tata kelola dan penyelenggaraan manajemen pendidikan belum mantab		
3	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.	5) Belum optimalnya pelestarian cagar budaya. 6) Kurangnya sumberdaya manusia berkompetensi pamong budaya.		
4	Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatkan pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	7) Belum semua kelompok kesenian mendapatkan pembinaan dan aktif.		
5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.			

### 3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dikemukakan sebagai berikut :

## 1. Bidang Pendidikan

- a) Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan Pendidikan Menengah
- b) Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
- c) Meningkatkan pemerataan, mutu, dan relevansi serta perluasan akses penyelenggaraan Pendidikan Khusus
- d) Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Formal dan Non Formal
- e) Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan
- f) Meningkatkan wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan

## 2. Bidang Kebudayaan

- a) Meningkatkan pengembangan kebudayaan dan pemeliharaan cagar budaya
- b) Pengembangan seni budaya dan pembinaan kelompok kesenian serta meningkatkan kapasitas pelaku budaya daerah.
- c) Pendataan cagar budaya dan pengelolaan kekayaan budaya sebagai jatidiri masyarakat Jawa Tengah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dapat dikemukakan pada tabel berikut.

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan Pendidikan Menengah	1) Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan di seluruh wilayah.	1) Kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan belum merata seluruh wilayah.	1) Komitmen Bupati dan DPRD dalam pembangunan pendidikan baik. 2) Peluang dan potensi kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam pembangunan pendidikan dan budaya. 3) Dukungan Pemerintah Pusat bagi peningkatan pendidikan dan kebudayaan semakin baik 4) Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun banyak difasilitasi Provinsi dan Pusat.
2	Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal	2) Belum optimalnya peningkatan kapasitas tenaga Pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai kompetensi	2) Kondisi sarana dan prasarana pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan menengah belum memenuhi standar SPM	
3	Peningkatkan pemerataan, mutu, dan relevansi serta perluasan akses penyelenggaraan Pendidikan Khusus	3) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pendidikan PAUD dan kesetaraan.	3) Kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan anak masih kurang.	
4	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Formal dan Non Formal	4) Tata kelola dan penyelenggaraan manajemen pendidikan belum mantab	4) Sinergitas antar stakeholder yang mendukung pendidikan sepanjang hayat belum optimal	
5	Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan	5) Belum optimalnya pelestarian cagar budaya.		
6	Meningkatkan wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan.	6) Kurangnya sumberdaya manusia berkompetensi pamong budaya.		
7	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Formal dan Non Formal.	7) Belum semua kelompok kesenian mendapatkan pembinaan dan aktif.		
8	Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan			
9	Meningkatkan wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan			

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

#### 3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pemalang Tahun 2020 – 2040, terdapat pembagian tata ruang wilayah, sebagai berikut :

- a. Rencana Struktur Ruang Wilayah.
- b. Rencana Pola Ruang Wilayah

Mendasarkan pada RTRW tersebut, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan secara taat memperhatikan pola ruang dan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan penataan ruang di wilayah. Permasalahan yang dihadapi perangkat daerah berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana struktur ruang wilayah yang semakin tertata sesuai dengan tata ruang secara berkelanjutan	1. Terbatasnya SDM aparatur baik kualitas maupun kuantitas dalam upaya Pendidikan dan kebudayaan secara merata seluruh wilayah.	1. Belum optimalnya pemahaman dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan Pendidikan anak usia sekolah dan Pendidikan kesetaraan.	1. Komitmen Buati dan DPRD dalam pembangunan Pendidikan dan kebudayaan semakin baik.
2	Rencana pola ruang wilayah yang semakin tertata dan terpadu diantara pusat-pusat pertumbuhan wilayah	2. Terbatasnya anggaran dalam pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana Pendidikan	2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendanaan dalam pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan PAUD dan Pendidikan	2. Terbukanya peluang kerjasama dalam pengembangan Pendidikan formal dan Pendidikan on formal.
		3. Terbatasnya tenaga fungsional kebudayaan di Kab. Pemalang agar dapat menjanglauh seluruh wilayah.		3. Adanya peluang

			dasar. 3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya	kerjasama dalam pengembangan Pendidikan dan kebudayaan
--	--	--	---	--

### 3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS merupakan instrumen pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan penguatan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah terhadap kebijakan, rencana, dan program.

KLHS disusun berdasarkan indikator dalam dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP/SDGz). Dalam penyusunan KLHS ini Dinas Pendidikan memiliki tanggungjawab melaksanakan tujuan 4 yaitu Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.. Adapun target yang menjadi tanggungjawab dinas pendidikan adalah

1. Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
2. Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
3. Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.
4. Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat.
5. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, untuk (a)

perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.

6. Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.
7. Persentase angka melek aksara penduduk umur  $\geq 15$  tahun.
8. Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.
9. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Penetapan Isu Strategis di Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan dengan menggunakan metode diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*). Adapun isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan diselesaikan pada periode perencanaan tahun 2021 - 2026, adalah sebagai berikut:

#### **1. Urusan Pendidikan**

- a. Masih rendahnya rata-rata pendidikan penduduk Kabupaten Pemalang, diketahui berdasarkan data 2020 rata-rata lama sekolah adalah 6,42 tahun lebih rendah daripada rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah (2020) sebesar 7,69 tahun. Capaian kinerja tersebut belum sesuai dengan Program Wajib Belajar 9 tahun dan rintisan menuju Wajib Belajar 12 Tahun.
- b. Belum semua sekolah SD/MI dan SMP/MTs terakreditasi minimal B, pada tahun 2020 persentase SD/MI terakreditasi Minimal B sebesar 95,50% dan SMP / MTs sebesar 90,96%.
- c. Guru yang memenuhi kualifikasi ketentuan layak mengajar (dengan kualifikasi lulusan D IV/Sarjana) dan bersertifikasi masih rendah (tahun 2020) sebesar 36,21%.

## 2. Urusan Kebudayaan:

- a. Belum optimalnya pengembangan kebudayaan, yaitu sampai dengan tahun 2020, hanya 59 obyek warisan budaya tak benda yang sudah teregistrasi.
- b. Belum semua kelompok seni budaya/ kesenian mendapatkan pembinaan dan kelompok seni budaya yang aktif sebesar 83,33% sampai dengan tahun 2020.
- c. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan pengelolaan kekayaan budaya (budaya benda dan budaya tak benda) sebesar 90,52% sampai dengan tahun 2020.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang Jaya dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, dengan indikator :
  - a. Harapan Lama Sekolah
  - b. Rata-Rata Lama sekolah
2. Meningkatkan pelestarian budaya, dengan indikator:
  - a. % warisan budaya yang ditetapkan

#### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Adapun sasaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang Jaya periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, dengan indikator :
  - a. Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.
  - b. Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)
  - c. Jumlah Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)

- d. Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
  - e. SD dan SMP minimal berakreditasi B
  - f. Persentase penduduk usia sekolah yang mendapat layanan pendidikan
2. Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan, dengan indikator :
- a. Cakupan warisan budaya yang dilestarikan

Tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan		Rata-Rata Lama sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n lama\ sekolah$	Tahun	6,42	6,50	6,70	6,90	7,10	7,30	7,50	7,50
			Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK >> \sum_{i=a}^n \frac{P_i^t}{P_i}$	Tahun	11,95	12,00	12,10	12,20	12,30	12,40	12,50	12,50
		Meningkatnya partisipasi sekolah masyarakat	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	Jumlah siswa pada jenjang Paud / Jumlah penduduk usia 5-6 Tahun x 100%	%	Na	100	100	100	100	100	100	100
			Angka Partisipasi Sekolah dasar	Jumlah siswa pada jenjang SD / Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun x 100%	%	Na	100	100	100	100	100	100	100
			Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa pada jenjang SMP / Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun x 100%	%	Na	100	100	100	100	100	100	100
			Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	Jumlah siswa pada jenjang Paket A,B,C / (jumlah penduduk usia 7-18 tahun)-(jumlah siswa SD,SMP,SMA x 100%	%	Na	100	100	100	100	100	100	100
			Sekolah Terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan terakreditasi/ Jumlah Satuan Pendidikan yang ada x 100%	%	98,84	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan pelestarian budaya		% warisan budaya yang ditetapkan	Rerata persentase warisan budaya benda yang ditetapkan dan persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan sesuai dengan UU 11 tahun 2010 dan UU 5 tahun 2017	%	3,26	3,26	3,26	3,5	3,5	3,5	3,75	3,75
		Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	Cakupan warisan yang dilestarikan	Warisan Budaya Yang Dilestarikan/Jml Warisan Budaya Diregistrasi x 100%	%	77,76	100	100	100	100	100	100	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **5.1. Strategi**

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses Pendidikan Dasar untuk menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun melalui pemenuhan kebutuhan sekolah.
2. Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini dan Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan nonformal melalui sosialisasi dan pendampingan siswa PAUD dan Pendidikan Non Formal
3. Peningkatan dan upaya pelestarian nilai-nilai dan seni budaya benda dan tak benda sebagai kekayaan Budaya melalui peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan kelembagaan seni budaya

#### **5.2. Kebijakan**

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan APK dan APM serta menurunkan Angka Putus Sekolah SD dan SMP sederajat
2. Meningkatkan APK PAUD dan Memfasilitasi perluasan penyelenggaraan Kejar Paket A, B, C di seluruh Kecamatan.
3. Meningkatkan perlindungan budaya, pelestarian dan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga budaya/ seni budaya

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Tabel. 5.1.

**Tabel 5.1.**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya partisipasi sekolah	Peningkatan Akses Pendidikan Dasar untuk menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun melalui pemenuhan kebutuhan sekolah.	Meningkatkan APK dan APM serta menurunkan Angka Putus Sekolah SD dan SMP sederajat
			Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini dan Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan nonformal melalui sosialisasi dan pendampingan siswa PAUD dan Pendidikan Non Formal	Meningkatkan APK PAUD dan Memfasilitasi perluasan penyelenggaraan Kejar Paket A, B, C di seluruh Kecamatan.
2	Meningkatkan pelestarian budaya	Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	Peningkatan dan upaya pelestarian nilai-nilai dan seni budaya benda dan tak benda sebagai kekayaan Budaya melalui peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan kelembagaan seni budaya	Meningkatkan perlindungan budaya, pelestarian dan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga budaya/ seni budaya

Sumber: Hasil Analisis, 2021

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program untuk tahun 2021 – 2026 kedepan penyusunan program pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang Jaya, akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Jaya serta sesuai dengan misi ke-3 yaitu: “Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong”.

Selain kegiatan administrasi perkantoran yang sifatnya rutin, untuk mengatasi permasalahan yang akan dihadapi tahun 2021 - 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang Jaya mencanangkan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan operasional sebagai kelanjutan kebijakan “Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong”.

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

### **1. Program Pengelolaan Pendidikan**

#### **a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**

- 1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
- 2) Penambahan Ruang Kelas Baru
- 3) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 4) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 5) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 8) Pengadaan Mebel Sekolah
- 9) Pengadaan Perlengkapan Siswa
- 10) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- 11) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 12) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- 13) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

- 14) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah
- 15) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 16) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 17) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

**b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

- 1) Penambahan Ruang Kelas Baru
- 2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
- 8) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 9) Pengadaan Mebel Sekolah
- 10) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- 11) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 12) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- 13) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 14) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 15) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 16) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

**c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

- 1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- 2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- 3) Pengadaan Mebel PAUD
- 4) Pengadaan Perlengkapan PAUD
- 5) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- 6) Pengelolaan Dana BOP PAUD

**d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**

- 1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
- 2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- 5) Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 6) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
- 7) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
- 8) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pembinaan Non Formal
- 9) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

## **2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**

### **a. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**

- 1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

## **3. Program Pengembangan Kurikulum**

### **a. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**

- 1) Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

## **4. Program Pengembangan Kebudayaan**

### **a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

### **b. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah**

- 1) Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan objek Pemajuan
- 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
- 3) Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

- 5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**
  - a. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah**
    - 1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- 6. Program Pembinaan Sejarah**
  - a. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah**
    - 1) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal
- 7. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**
  - a. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten**
    - 1) Penetapan Cagar Budaya
- 8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
    - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- 7) Penyediaan Bahan/ Material
  - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Pemeliharaan Mebel
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program untuk tahun 2021 – 2026 kedepan penyusunan program pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang Jaya, akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Jaya serta sesuai dengan misi ke-3 yaitu: “Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong”.

Selain kegiatan administrasi perkantoran yang sifatnya rutin, untuk mengatasi permasalahan yang akan dihadapi tahun 2021 - 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang Jaya mencanangkan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan operasional sebagai kelanjutan kebijakan “Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong”.

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

### **9. Program Pengelolaan Pendidikan**

#### **e. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**

- 1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
- 2) Penambahan Ruang Kelas Baru
- 3) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 4) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 5) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 8) Pengadaan Mebel Sekolah
- 9) Pengadaan Perlengkapan Siswa
- 10) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- 11) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 12) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

- 13) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 14) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah
- 15) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 16) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 17) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

**f. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

- 1) Penambahan Ruang Kelas Baru
- 2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
- 8) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 9) Pengadaan Mebel Sekolah
- 10) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- 11) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 12) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- 13) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 14) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 15) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 16) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

**g. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

- 1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- 2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- 3) Pengadaan Mebel PAUD
- 4) Pengadaan Perlengkapan PAUD
- 5) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- 6) Pengelolaan Dana BOP PAUD

**h. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**

- 1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan

- 2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- 5) Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 6) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
- 7) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
- 8) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pembinaan Non Formal
- 9) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

## **10. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**

### **b. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**

- 1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

## **11. Program Pengembangan Kurikulum**

### **b. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**

- 1) Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

## **12. Program Pengembangan Kebudayaan**

### **c. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

### **d. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah**

- 1) Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan objek Pemajuan

- 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
- 3) Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

### **13. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

#### **b. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah**

- 1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

### **14. Program Pembinaan Sejarah**

#### **b. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah**

- 1) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal

### **15. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**

#### **b. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten**

- 1) Penetapan Cagar Budaya

### **16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

#### **h. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

#### **i. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

#### **j. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

**k. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyediaan Bahan/ Material
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**l. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**m. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**n. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan Mebel
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam **Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni.** dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dibagi Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Daerah yang bersangkutan x 100 %	%	55,46	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dibagi Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Daerah yang bersangkutan x 100 %	%	95	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dibagi Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Daerah yang bersangkutan x 100 %	%	74,81	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan x 100%	%	64,7	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	SD dan SMP minimal berakreditasi B	Jumlah SD dan SMP minimal berakreditasi B dibagi jumlah SD dan SMP keseluruhan x 100%	%	99,3	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase penduduk usia sekolah yang mendapat layanan pendidikan	$(\text{aps} + \text{sd} + \text{smp} + \text{dikmas} + \text{paud}) / 4$	%	72,49	100	100	100	100	100	100	
7	Cakupan warisan budaya yang dilestarikan	Warisan Budaya Yang Dilestarikan / Jml Warisan Budaya Diregistrasi x 100%	%	77,76	100	100	100	100	100	100	

Sementara itu untuk Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dibagi Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Daerah yang bersangkutan x 100 %	%	55,46	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dibagi Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Daerah yang bersangkutan x 100 %	%	95	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Jumlah Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dibagi Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Daerah yang bersangkutan x 100 %	%	74,81	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan x 100%	%	64,7	100	100	100	100	100	100	100
5	Terlestariannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi Jumlah cagar budaya yang terdata x 100%	%	3,26	3,26	3,26	3,5	3,5	3,5	3,75	3,75

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang sebagaimana dikemukakan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan aktif dalam mendukung dan mensukseskan tercapainya Visi Kabupaten Pemalang yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni” dan agenda pembangunan daerah sesuai kewenangan dalam pembangunan bidang Pendidikan dan kebudayaan yang bersifat strategis bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan jatidiri masyarakat Pemalang.

Agar Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan kesatuan langkah dan kesamaan pandang dari segenap aparatur dinas dan pemangku kepentingan pembangunan Pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan setiap tahun melalui rencana kerja perangkat daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang.

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dalam bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) setelah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berakhir. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 - 2026 ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2027 dengan berpedoman arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 – 2046 yang baru.

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Penyusunan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, agar dicapai efektivitas dan efisiensi, baik dalam pendanaan program maupun waktu pelaksanaan kegiatan

berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan dikemukakan sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib mendukung tercapainya target-target yang ditetapkan dalam Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh aparatur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahun dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan selama periode perencanaan selama lima tahun.
4. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan arah kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja PD ini wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala.
6. Laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati Pemalang melalui Bappeda Kabupaten Pemalang secara berkala dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pemalang, Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan



**MUALIP, S.Pd. MM**  
NIP. 19720802 199802 1 001

**TABEL INDIKATOR DAN ANGGARAN 5 TAHUN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KABUPATEN PEMALANG**

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran										
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.										
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretaris Dinas	Prosentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah	-	100	707.283.931.000	100	702.308.815.000	100	702.224.315.000	100	702.260.315.000	100	702.297.815.000	100	702.333.815.000
5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretaris Dinas	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	-	100	730.000.000	100	710.000.000	100	712.500.000	100	715.000.000	100	720.000.000	100	722.500.000
5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kasubbag Bina Program	dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (jumlah)	-	4	640.000.000	4	645.000.000	4	647.500.000	4	650.000.000	4	655.000.000	5	657.500.000

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran										
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.										
5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kasubbag Bina Program	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang tersusun (dok)	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kasubbag Bina Program	Jumlah dokumen perubahan program dan kegiatan tersusun (dok)	-	3	50.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000
5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kasubbag Bina Program	Jumlah laporan capaian kinerja dan kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun (dok)	-	4	15.000.000	4	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000
<b>5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Sekretaris Dinas</b>	<b>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (Persen)</b>	-	<b>100</b>	<b>697.714.965.000</b>	<b>100</b>	<b>697.724.965.000</b>	<b>100</b>	<b>697.734.965.000</b>	<b>100</b>	<b>697.744.965.000</b>	<b>100</b>	<b>697.754.965.000</b>	<b>100</b>	<b>697.764.965.000</b>
5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubbag Keuangan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN (tahun)	-	1	697.584.965.000	1	697.584.965.000	1	697.584.965.000	1	697.584.965.000	1	697.584.965.000	1	697.584.965.000

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran										
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.										
5.03.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kasubbag Bina Program	Jumlah koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD (unit kerja)	-	96	100.000.000	-	105.000.000	-	110.000.000	-	115.000.000	-	120.000.000	-	125.000.000
5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kasubbag Bina Program	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun (dok)	-	1	15.000.000	1	17.500.000	1	20.000.000	1	22.500.000	1	25.000.000	1	27.500.000
5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kasubbag Bina Program	Jumlah laporan/triwulan/semesteran yang disusun (dok)	-	1	15.000.000	1	17.500.000	1	20.000.000	1	22.500.000	1	25.000.000	1	27.500.000
<b>5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Sekretaris Dinas</b>	<b>Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (Persen)</b>	-	<b>100</b>	<b>454.425.000</b>	<b>100</b>	<b>457.500.000</b>	<b>100</b>	<b>460.000.000</b>	<b>100</b>	<b>462.500.000</b>	<b>100</b>	<b>465.000.000</b>	<b>100</b>	<b>467.500.000</b>
5.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kasubbag Bina Program & Keuangan	Jumlah seluruh aset yang disusun tiap tahun (unit kerja)	-	800	454.425.000	800	457.500.000	350	460.000.000	350	462.500.000	350	465.000.000	350	467.500.000
<b>5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Sekretaris Dinas</b>	<b>Persentase administrasi umum perangkat daerah (Persen)</b>	-	<b>100</b>	<b>1.859.945.000</b>	<b>100</b>	<b>1.953.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.836.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.844.500.000</b>	<b>100</b>	<b>1.852.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.860.500.000</b>

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran										
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.										
5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli (jenis, unit)	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000
5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli (unit kerja/kali)	-	116	154.500.000	4	157.000.000	4	160.000.000	4	162.500.000	4	165.000.000	4	167.500.000
5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli (jenis/paket)	-	1	28.600.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli (unit kerja/kali)	-	116	167.825.000	116	168.000.000	116	169.000.000	116	170.000.000	116	171.000.000	116	172.000.000
5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jenis barang yang dicetak dan digandakan (unit kerja/kali)	-	116	170.000.000	116	172.000.000	116	174.000.000	116	176.000.000	116	178.000.000	116	180.000.000

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran										
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.										
5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jenis dan jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang dibeli (unit kerja/kali)	-	116	63.000.000	116	65.000.000	116	67.000.000	116	70.000.000	116	72.000.000	116	75.000.000
5.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jumlah bahan material yang dibeli (buah)	-	60	140.020.000	60	225.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000
5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti (unit kerja/kali)	-	829	1.126.000.000	829	1.126.000.000	829	1.126.000.000	829	1.126.000.000	829	1.126.000.000	829	1.126.000.000
5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretaris Dinas	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Persen)	-	100	5.436.446.000	100	365.000.000	100	370.000.000	100	370.000.000	100	370.000.000	100	370.000.000
5.03.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli dalam satu tahun (unit)	-	2	60.426.000	2	65.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dibeli (unit/paket)	-	702	5.376.020.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000
5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretaris Dinas	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Persen)	-	100	363.150.000	100	370.850.000	100	380.850.000	100	390.850.000	100	400.850.000	100	410.850.000
5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jumlah surat masuk, surat keluar, materai dan pengiriman dokumen (surat)	-	7.822	5.850.000	7.822	5.850.000	7.822	5.850.000	7.822	5.850.000	7.822	5.850.000	7.822	5.850.000
5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan (rekening)	-	1.044	260.000.000	31	265.000.000	31	270.000.000	31	275.000.000	31	280.000.000	31	285.000.000
5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jasa-jasa pelayanan umum yang dibayarkan (ok)	-	12	97.300.000	12	100.000.000	12	105.000.000	12	110.000.000	12	115.000.000	12	120.000.000

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran										
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.										
5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretaris Dinas	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Persen)	-	100	725.000.000	100	727.500.000	100	730.000.000	100	732.500.000	100	735.000.000	100	737.500.000
5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas jabatan (unit/kali)	-	65	140.000.000	67	142.500.000	70	145.000.000	72	147.500.000	74	150.000.000	76	152.500.000
5.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jumlah dan jenis mebel yang dipelihara (unit)	-	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000
5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jenis peralatan dan mesinnya yang dipelihara (unit)	-	210	80.000.000	210	80.000.000	210	80.000.000	210	80.000.000	210	80.000.000	210	80.000.000
5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran										
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.										
5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	-	3	470.000.000	3	470.000.000	3	470.000.000	3	470.000.000	3	470.000.000	3	470.000.000

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sekretaris Dinas, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Sarpras, Bidang Pembinaan Ketenagaan, Bidang Pembinaan PAUD-DIKMAS	Persentase terkelolanya pendidikan SD, SMP, PAUD, Nonformal/Kese-taraan (%)	-	100	272.744.548.000	100	69.780.664.000	100	68.836.700.000	100	68.836.700.000	100	68.946.700.000	100	68.946.700.000

1.01.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekretaris Dinas, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Sarpras, Bidang Pembinaan Ketenagaan,	Prosentasesekolah yang sarana dan prasarannya tersedia dan terpelihara dengan baik sehingga mendapat predikat akreditasi minimal B, serta terlaksananya kegiatan lomba OSN, O2Sn yang menunjang peningkatan mutu dan terlaksananya pendampingan penatausahaan Dana BOS pada jenjang SD	-	100	158.024.702.980	100	30.020.600.000	100	30.074.000.000	100	30.074.000.000	100	30.114.000.000	100	30.114.000.000
1.01.02.2.01.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kasi Sarpras SD pada Bidang Sarpras	Jumlah tanah bagi bangunan pendidikan (sekolah)	-	1	4.300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.01.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran										
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.										
1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Kasi Sarpras SD pada Bidang Sarpras	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah (ruang)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.03 Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	Kasi Sarpras SD pada Bidang Sarpras	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU sekolah SD yang terbangun (ruang)		2	421.696.800	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000
1.01.02.2.01.05 Pembangunan perpustakaan sekolah	Kasi Sarpras SD pada Bidang Sarpras	Jumlah Ruang perpustakaan sekolah SD yang terbangun (ruang)	4	10	2.400.526.000	10	2.200.000.000	10	2.200.000.000	10	2.200.000.000	10	2.200.000.000	10	2.200.000.000
1.01.02.2.01.06 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Kasi Sarpras SD pada Bidang Sarpras	Jumlah ruang guru SD, ruang lab komputer SD, ruang perpustakaan SD, toilet (jamban) SD yang terbangun (ruang/paket)	-	36	4.252.838.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Kasi Sarpras SD pada Bidang Sarpras	Jumlah ruang kelas yang direhab (ruang)	112	-	-	10	2.200.000.000	10	2.200.000.000	10	2.200.000.000	10	2.200.000.000	10	2.200.000.000

1.01.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan utilitas sekolah	Kasi Sarpras SD pada Bidang Sarpras	Jumlah ruang kelas SD yang terrehab (ruang)	-	68	7.421.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Kasi Sarpras SD pada Bidang Sarpras	Jumlah mebeleur sekolah SD yang terganti (paket)	-	27	1.080.992.080	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000
1.01.02.2.01.14 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kasi Sarpras SD pada Bidang Sarpras	Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kasi SD pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Jumlah siswa penerima beasiswa bagi siswa SD yang tidak mampu (anak/siswa)	35	1.300	406.600.000	1300	406.600.000	1500	460.000.000	1500	460.000.000	1600	500.000.000	1600	500.000.000
1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kasi Sarpras SD pada Bidang Sarpras	Jumlah peralatan TIK SD yang tersedia (paket)	6	14	3.065.350.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000	15	750.000.000
1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kasi SD pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta ujian SD/MI (anak/siswa)	25.000	23.000	266.750.000	23000	300.000.000	23000	300.000.000	23000	300.000.000	23000	300.000.000	23000	300.000.000

1.01.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kasi SD pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta OSN, FLS2N tingkat SD dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SD (siswa/sekolah)	84	212,3590,61,1570	200.000.000	212,3590,61,1570	200.000.000	212 peserta,3590 peserta,61 sekolah,1570 peserta	200.000.000	212,3590,61,1570	200.000.000	212,3590,61,1570	200.000.000	212,3590,61,1570	200.000.000

1.01.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kasi Pengembang an Ketenagaan pada Bidang Pembinaan Ketenagaan	Jumlah Peserta Diklat Kepala Sekolah, Seleksi KS dan Pengawas Sekolah, Sertifikasi Pendidik, Uji Kompetensi Pendidik dan tenaga Kependidikan, jurnal yang Tenaga K2 dan Non K2, Guru Honorer Di sekolah Swasta dan Negeri yang menerima insentif (orang/terbit)	260	80 orang 150 orang 449 orang 110 orang 2 terbit 4173 orang 2055 orang 794 orang	21.414.000.000	40 orang 97 orang 449 orang 110 orang 2055 orang 12220 orang	21.414.000.000	40 orang 97 orang 449 orang 110 orang 2055 orang 12220 orang	21.414.000.000	40 orang 97 orang 449 orang 110 orang 2055 orang 12220 orang	21.414.000.000	40 orang 97 orang 449 orang 110 orang 2055 orang 12220 orang	21.414.000.000	40 orang 97 orang 449 orang 110 orang 2055 orang 12220 orang	21.414.000.000
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kasi SD pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah SMP yang diakreditasi (sekolah)	5 sekolah	10 sekolah	50.000.000	10 sekolah	50.000.000	10 sekolah	50.000.000	10 sekolah	50.000.000	10 sekolah	50.000.000	10 sekolah	50.000.000

1.01.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kasubag Bina Program pada Sekretariat Dinas	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS (sekolah)	718	747	111.539.700.000	747	-	747	-	747	-	747	-	747	-
1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kasubag Bina Program pada Sekretariat Dinas	Jumlah Sekolah yang didampingi dalam penatausahaan BOS tingkat SD (sekolah)	747	718	1.205.000.000	718	1.000.000.000	718	1.000.000.000	718	1.000.000.000	718	1.000.000.000	718	1.000.000.000

1.01.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekretaris Dinas, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Sarpras	Prosentase sekolah yang sarana dan prasarannya tersedia dan terpelihara dengan baik sehingga mendapat predikat akreditasi minimal B, serta terlaksananya kegiatan lomba OSN, O2SN yang menunjang peningkatan mutu dan terlaksananya pendampingan penatausahaan Dana BOS pada jenjang SMP	-	100	79.022.942.200	100	7.112.364.000	100	6.115.000.000	100	6.115.000.000	100	6.185.000.000	100	6.185.000.000
1.01.02.2.02.02 Penambahan ruang kelas baru	Kasi Sarpras SMP pada Bidang Sarpras	Jumlah RKB SMP yang terbangun (ruang)	4	2	680.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.01.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kasi Sarpras SMP pada Bidang Sarpras	Jumlah toilet (jamban) yang terbangun (paket)	-	1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Kasi Sarpras SMP pada Bidang Sarpras	Jumlah ruang kelas yang direhab (ruang)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Kasi Sarpras SMP pada Bidang Sarpras	Jumlah ruang guru sekolah SMP yang terrehab (ruang)	-	2	533.580.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000
1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	Kasi Sarpras SMP pada Bidang Sarpras	Jumlah ruang UKS sekolah SMP yang terrehab (ruang)	-	4	153.000.750	4	240.000.000	4	240.000.000	4	240.000.000	4	240.000.000	4	240.000.000
1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Kasi Sarpras SMP pada Bidang Sarpras	Jumlah Ruang perpustakaan sekolah SMP yang terrehab (ruang)	-	4	954.450.000	5	1.100.000.000	5	1.100.000.000	5	1.100.000.000	5	1.100.000.000	5	1.100.000.000
1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	Kasi Sarpras SMP pada Bidang Sarpras	Jumlah ruang laboratorium sekolah SMP yang terrehab (ruang)	-	4	2.221.226.750	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000
1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan utilitas sekolah	Kasi Sarpras SMP pada Bidang Sarpras	Jumlah ruang kelas sekolah SMP yang terrehab (ruang)	-	8	22.973.420.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.01.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Kasi Sarpras SMP pada Bidang Sarpras	Jumlah mebel bagi sekolah SMP yang tersedia (paket)	2	2	1.022.300.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000
1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Disik Sekolah Menengah Pertama	Kasi SMP pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Jumlah Siswa SMP yang menerima beasiswa (anak/siswa)	-	850	478.400.000	850	478.400.000	1000	550.000.000	1000	550.000.000	1200	620.000.000	1200	620.000.000
1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kasi Sarpras SMP pada Bidang Sarpras	Jumlah alat lab IPA biologi, alat lab IPA fisika, media pendidikan dan TIK yang tersedia (paket)	-	19	2.068.964.000	19	2.068.964.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000
1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kasi SMP pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Jumlah peserta PPDB online, jumlah peserta Ujian SMP, dan peserta wisata edukasi siswa SMP (anak/siswa)	2.314	23200 dan 100	900.000.000	23.200 siswa, 23.200 siswa, 100 orang	900.000.000	23.200 siswa, 23.200 siswa, 100 orang	900.000.000	23.200 siswa, 23.200 siswa, 100 orang	900.000.000	23.200 siswa, 23.200 siswa, 100 orang	900.000.000	23.200 siswa, 23.200 siswa, 100 orang	900.000.000

1.01.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kasi SMP pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta OSN, FLS2N tingkat SMP dan Sekolah yang mengikuti sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SMP (siswa/sekolah)	50	3590, 61	200.000.000	3590, 61	200.000.000	3590, 61	200.000.000	3590, 61	200.000.000	3590, 61	200.000.000	3590, 61	200.000.000
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kasi SMP pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah SMP yang diakreditasi (sekolah)	-	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000
1.01.02.2.02.42 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kasubag Bina Program pada Sekretariat Dinas	Jumlah Sekolah yang menerima Dana BOS (sekolah)	66	66	46.162.600.000	66	-	66	-	66	-	66	-	66	-
1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kasubag Bina Program pada Sekretariat Dinas	Jumlah Sekolah yang mendapat pendampingan penatausahaan BOS tingkat SMP (sekolah)	116	116	325.000.000	66	325.000.000	66	325.000.000	66	325.000.000	66	325.000.000	66	325.000.000

1.01.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran										
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.										
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bidang Sarpras, Bidang Pembinaan PAUD-DIKMAS	Jumlah sekolah yang sarana dan prasarannya tersedia dan terpelihara dengan baik sehingga mendapat predikat akreditasi minimal B, serta terlaksananya kegiatan yang menunjang peningkatan mutu dan terlaksananya pendampingan penatausahaan Dana BOP PAUD pada jenjang PAUD	-	100	28.610.635.820	100	26.439.333.000	100	26.439.333.000	100	26.439.333.000	100	26.439.333.000	100	26.439.333.000
1.01.02.2.03.01 Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	Kasi Sarpras PAUD pada Bidang Sarpras	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang terbangun (paket)	-	2	660.449.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.01.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Kasi Sarpras PAUD pada Bidang Sarpras	Jumlah gedung sekolah PAUD yang terbangun (paket)	-	2	1.119.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Kasi Sarpras PAUD pada Bidang Sarpras	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan utilitas PAUD (Paket)	-	3	1.040.853.820	5	550.000.000	5	550.000.000	5	550.000.000	5	550.000.000	5	550.000.000
1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	Kasi Sarpras PAUD pada Bidang Sarpras	Jumlah mebeleur PAUD yang tersedia (paket)	-	6	132.000.000	10	220.000.000	10	220.000.000	10	220.000.000	10	220.000.000	10	220.000.000
1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kasi Sarpras PAUD pada Bidang Sarpras	Jumlah Alat peraga edukasi dan alat bermain PAUD yang tersedia (paket)	-	9	99.000.000	10	110.000.000	10	110.000.000	10	110.000.000	10	110.000.000	10	110.000.000

1.01.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran										
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.										
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kasi PAUD pada Bidang Pembinaan PAUD-DIKMAS	Jumlah Tenaga pendidik PAUD yang mendapat kesra, Jumlah tenaga pendataan PAUD yang terfasilitasi, jumlah lembaga yang mendapat BOP PAUD TKN, jumlah APE dalam PAUD yang tersedia, jumlah peserta sosialisasi PAUD Non Formal dan Informal, dan jumlah peserta workshop kurikulum PAUD (orang/bulan/lembaga/unit/peserta)	-	1500 orang/bulan 35 orang 13 lembaga 70 unit 30 lembaga/paket 304 peserta 50 orang	25.559.333.000	1500 orang/bulan 35 orang 13 lembaga 70 unit 30 lembaga/paket 304 peserta 50 orang	25.559.333.000	1500 orang/bulan 35 orang 13 lembaga 70 unit 30 lembaga/paket 304 peserta 50 orang	25.559.333.000	1500 orang/bulan 35 orang 13 lembaga 70 unit 30 lembaga/paket 304 peserta 50 orang	25.559.333.000	1500 orang/bulan 35 orang 13 lembaga 70 unit 30 lembaga/paket 304 peserta 50 orang	25.559.333.000	1500 orang/bulan 35 orang 13 lembaga 70 unit 30 lembaga/paket 304 peserta 50 orang	25.559.333.000

1.01.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran										
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.										
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kasi PAUD pada Bidang Pembinaan PAUD-DIKMAS	Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang menerima BOP PAUD (lembaga/satuan pendidikan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bidang Pembinaan PAUD-DIKMAS	Prosentase lembaga Non formal yang terfasilitasi , terpenuhi sarana prasarananya dan mendapatkan hibah	-	100	7.086.267.000	100	6.208.367.000	100	6.208.367.000	100	6.208.367.000	100	6.208.367.000	100	6.208.367.000
1.01.02.2.04 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kasi DIKMAS pada Bidang Pembinaan PAUD-DIKMAS	Jumlah lembaga non formal yang menerima hibah (tahun)	-	-	847.100.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000
1.01.02.2.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kasi DIKMAS pada Bidang Pembinaan PAUD-DIKMAS	Jumlah ruang praktik guru SKB Comal, TBM SKB Comal, dan toilet SKB Comal (ruang/paket)	4	3	96.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.01.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.01.02.2.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kasi DIKMAS pada Bidang Pembinaan PAUD-DIKMAS	Jumlah ruang kelas SKB Comal yang terrehab (ruang)	2	1	182.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kasi DIKMAS pada Bidang Pembinaan PAUD-DIKMAS	Jumlah ruang administrasi SKB Comal yang terrehab (ruang)	-	1	182.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kasi DIKMAS pada Bidang Pembinaan PAUD-DIKMAS	Jumlah Mebeul yang tersedia bagi Lembaga Nonformal (paket)	-	4	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Kasi DIKMAS pada Bidang Pembinaan PAUD-DIKMAS	Jumlah alat TIK yang tersedia bagi SKB Comal (paket)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.01.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran										
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.										
1.01.02.2.14 Penyelenggara Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kasi DIKMAS pada Bidang Pembinaan PAUD-DIKMAS	Jumlah lembaga pengelola Paket C yang menerima BOP , Jumlah lokasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan kecakapan hidup (Musrenbangdas , Gender, Rakor Dikmas, Sosialisasi Pembelajaran Daring, Inventarisasi LKP, Study Banding), satuan pendidikan/lokasi)	-	16 satdik 3 lokasi	5.058.367.000										

1.01.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.01.02.2.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kasi DIKMAS pada Bidang Pembinaan PAUD-DIKMAS	Jumlah lembaga yang menerima hibah (Dewan Pendidikan) dan lembaga lainnya (kelompok belajar/satuan pendidikan)	75, 16	20 orang 1 lembaga /paket	650.000.000	20 orang 1 lembaga/paket	650.000.000								
1.01.02.2.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kasi DIKMAS pada Bidang Pembinaan PAUD-DIKMAS	Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang menerima BOP Kesetaraan (lembaga/satuan pendidikan)	16	16	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16	-
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Prosentase Pengembangan kurikulum yg dilaksanakan (%)		100	400.000.000		400.000.000		-		-		-		-

1.01.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.01.03.2 Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Jumlah Guru SD dan SMP yang ikut serta dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Karakter		400	400.000.000		400.000.000		-		-		-		-
1.01.03.2.04 Pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	Kasi Kurikulum pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Jumlah Guru SD dan SMP yang mendapatkan Sosialisasi Penguatan Karakter (guru)	-	400	400.000.000	300 Guru SD dan 100 Guru SMP	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Bidang Pembinaan Ketenagaan	Prosentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		100			343.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000

1.01.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bidang Pembinaan Ketenagaan	Prosentase ASN yang mendapat pembinaan, dan jumlah SK bagi ASN yang pensiun, Naik Pangkat serta mutasi		100	318.000.000		343.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kasi Pembinaan Ketenagaan pada Bidang Pembinaan Ketenagaan	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan, jumlah sosialisasi peraturan bidang pendidik, Jumlah data tenaga pendidik dan kependidikan yang memasuki usia pensiun (kasus/ASN)	100	20 kasus 500 ASN 250 ASN	93.000.000	20 kasus 500 ASN 250 ASN	93.000.000	20 kasus 400 ASN 100 ASN 250 ASN	100.000.000						

1.01.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran										
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.										
1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kasi Mutasi Ketenagaan pada Bidang Pembinaan Ketenagaan	Jumlah ASN yang dimutasi , Jumlah SK tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapat kenaikan pangkat dan jumlah SK Mutasi ASN (orang/SK)	680	200 orang 6800 SK 100 SK	225.000.000	200 orang 6800 SK 100 SK	250.000.000								

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Penanggung jawab	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran										
	(Kasubag X / Sekretaris)	Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.										
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kabid Kebudayaan	Prosentase Pengembangan Kebudayaan di Kab Pemalang yang terlaksana	-	100	1.000.000.000	100	1.350.000.000	100	1.350.000.000	100	1.350.000.000	100	1.350.000.000	100	1.350.000.000

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Penanggung jawab  (Kasubag X / Sekretaris)	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran										
		Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.										
2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabid Kebudayaan	Prosentase kegiatan Kebudayaan yang terfasilitasi	-	100	275.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000
2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kasi Kesenian pada Bidang Kebudayaan	Jumlah diselenggarakannya kirab pataka dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pemalang (kegiatan)	-	1	175.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000
2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia,Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kasi Kesenian pada Bidang Kebudayaan	Jumlah lomba cerdas cermat kebudayaan studi orientasi dan fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan kebudayaan (kegiatan)	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesenian yang terfasilitasi			725.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Penanggung jawab  (Kasubag X / Sekretaris)	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran
		Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan bjek Pemajuan Kebudayaan	Kasi Kesenian pada Bidang Kebudayaan	Jumlah fasilitas kelompok kesenian, Festival kesenian dolanan anak (kali)	-	14	275.000.000	2 kali 1 kali 10 kali 1 kali	300.000.000								
2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kasi Kesenian pada Bidang Kebudayaan	Jumlah tampilan seni tingkat lokal, regional, dan nasional (kegiatan)	-	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000
2.22.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Kasi Kesenian pada Bidang Kebudayaan	Dewan Kesenian yang mendapatkan dana hibah (kali)	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
<b>2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Kabid Kebudayaan</b>	<b>Prosentase Kesenian tradisional yang difasilitasi</b>													
2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					-		-		-		-		-		-

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Penanggung jawab  (Kasubag X / Sekretaris)	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran
		Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kasi Kesenian pada Bidang Kebudayaan		5 kali	20 orang 1 lembaga/paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>Kabid Kebudayaan</b>	<b>Prosentase Pembinaan Sejarah yang terlaksana</b>		100	<b>225.000.000</b>	-	<b>225.000.000</b>								
<b>2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabid Kebudayaan</b>	<b>Jumlah kegiatan LKTI dan kemah budaya</b>		2	<b>225.000.000</b>		<b>225.000.000</b>								
2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kasi Sejarah Purbakala pada Bidang Kebudayaan	Jumlah kegiatan LKTI dan kegiatan kemah budaya tingkat kabupaten (kegiatan)	2	2	225.000.000	1 kegiatan 1 kegiatan	225.000.000								
<b>2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Kabid Kebudayaan</b>	<b>Prosentase Cagar Budaya yang dikelola</b>		100	<b>19.500.000</b>		<b>300.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		<b>200.000.000</b>
<b>2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabid Kebudayaan</b>	<b>Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan Jumlah kajian yang tersusun</b>		2 cagar, 2 kajian	<b>19.500.000</b>		<b>200.000.000</b>								

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Penanggung jawab  (Kasubag X / Sekretaris)	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Indikator		Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran
		Uraian (satuan)	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya	Kasi Sejarah Purbakala pada Bidang Kebudayaan	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan Jumlah kajian yang tersusun (cagar/kajian)	3	2 cagar, 2 kajian	19.500.000	2 cagar, 2 kajian	200.000.000								
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kabid Kebudayaan	Rumah budaya yang terrehab dan jumlah kegiatan jaman yang dilaksanakan		1 unit, 1 kali	685.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Kasi Sejarah Purbakala pada Bidang Kebudayaan	Rumah budaya yang terrehab dan jumlah kegiatan jaman yang dilaksanakan (paket/kegiatan)	3 paket, 10 kegiatan	1 unit, 1 kali	685.000.000	1 kali	100.000.000								
2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	Kasi Sejarah Purbakala pada Bidang Kebudayaan	Jumlah Sekolah yang didampingi dalam penatausahaan BOS tingkat SD (sekolah)	3	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-